ENEWSLETTER
PKSPARLEMEN
KREATIF, ATRAK
Edisi November II Tahun 2021 No. 23

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Habib Dr. Salim Segaf Aljufri, MA

Lomba Baca Kitab Kuning Ke-V

Jadikan Sarana Kokohkan Nasionalisme

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

STOP Berbisnis Dengan Rakyat

Munculnya Conflict of Interest adalah berita buruk bagi reputasi, integritas, dan kepercayaan publik terhadap suatu Negara. Seiring berjalan waktu akan terkikis habis, meski sekuat batu karang kehendaknya. Percayalah!

Rakyat itu bukanlah komoditas yang bisa diperjualbelikan, ditukar, apalagi digadaikan. Mereka adalah objek dan subjek yang harus diberikan proteksi, dorongan dan pelayanan maksimal dari negara. Karena sejatinya mandat yang dimiliki oleh pemerintahan, seorang pejabat dan kepala negara di berikan oleh rakyat. Tanpa kuasa itu mereka bukanlah siapa-siapa. Jangankan APBN, otoritas saja mereka tak memiliki. Itulah hebatnya dan magis-nya kuasa rakyat. Bahkan ada yang menisbatkan mandat tersebut dengan ungkapan "Suara rakyat suara Tuhan"

Tapi rumitnya hari-hari ini rakyat seakan ditinggalkan jauh dibelakang, dikenakan berbagai macam aturan dan dihadapkan pada aparatur yang tak melayani. Jika pun mereka di depan, dijadikan objek untuk menangguk keuntungan; contohnya tes usap hidung yang sempat melambung tinggi dan harganya melampaui nalar, kini jatuh terkoyak dihadapan sejumlah data dan fakta ada sengkarut bisnis dibelakangnya. Ironisnya para pemilik korporasi tes usap hidung adalah para pengambil kebijakan. Transaksi dan regulasi berkelindan dalam pusaran yang sama. Berputar-putar, kusut dan ruwet.

Kala fakta terkuak keruang publik, beragam argumentasi sanggahan muncul dan menyeruak mencoba menghapus tabir. Dalihnya tindakan informai itu bentuk kontribusi terhadap negeri, dalihnya malah sebagai donasi. Jikapun ada untung yang diraih hanya sedikit dan bukan yang paling dominan. Persoalan etika, bukan semata jumlah angka dan volume. Sejatinya etika bicara pada persoalan kelayakan dan kepantasan. Tentu saja tidak pantas seorang pembuat regulasi, kemudian secara aktif jadi pelaku industri yang ironisnya terjadi di tengah pandemi. Saat Rakyat Terpuruk Lahir dan Batin. Tega !

Terbaru kewaspadaan akan virus delta menimbulkan kekhwatiran lebih dalam penanganan Covid 19. Informasi yang seharusnya disampaikan oleh otoritas kesehatan berbasis bukti (evidence based) yang objektif justru disampaikan oleh pejabat yang ramai di publik karena diduga terlibat dalam perusahaan yang berbisnis PCR. Pesan dengan sendirinya mengalami degradasi dan bias. Rontok sebelum berkembang!

Situasi yang ranum dengan *conflict of interest* ini bukan sebuah kebetulan dan temporer, jika ditelisik lebih dalam diduga menjadi pola dan gaya menjalankan banyak kebijakan. Memperkuat rekan dan kawan, sembari menangguk manfaat dari tindakan kesehatan yang dilakukan masyarakat.

Conflict of Interest dapat menyebabkan seorang pemegang mandat bertindak di luar kepentingan dan tujuan Pemerintahan. Munculnya Conflict of Interest adalah berita buruk bagi reputasi, integritas, dan kepercayaan publik terhadap suatu Negara. Seiring berjalan waktu akan terkikis habis, meski sekuat batu karang kehendaknya. Percayalah !

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Kreatif, Atraktif, Substantif

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Dua Tahun Pemerintah Jokowi-Ma'ruf, Wakil Ketua FPKS: Bidang Energi Masih Merah

KUTIPAN

Jakarta (21/10) --- Dua tahun masa kerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, menurut Anggota DPR RI Mulyanto, masih belum berhasil membangun bidang energi dengan baik.

Menurut Mulyanto, hingga kini bidang energi nasional masih terpuruk dan belum menunjukan tanda-tanda yang menggembirakan.

"Prestasinya masih datar-datar saja bahkan cenderung merah," kata Mulyanto.

Mulyanto merinci, di sektor migas, baik impor, lifting maupun pembangunan kilang baru masih jeblok. Impor migas nasional, terutama BBM dan LPG, bukannya menurun malah terus melonjak. Akibatnya defisit transaksi berjalan membengkak.

"Pemerintah seperti tidak punya strategi yang konsisten untuk menurunkan impor migas ini," ujar Mulyanto.

Data BPS menunjukan pada Mei 2021, lonjakan impor migas menjadi sebesar USD 2.06 milyar. Bila dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun 2020 (y-on-y) meningkat sebesar 212 persen.

Defisit transaksi berjalan untuk sektor migas ini sebesar USD 1.12 milyar meningkat sebesar 1020 persen dibandingkan tahun 2020 (y-on-y). Meroket lebih dari sepuluh kali lipat.

Defisit transaksi berjalan sektor migas untuk tahun 2021 diperkirakan meningkat menjadi sebesar 11 milyar USD. Padahal pada tahun 2019 hanya sebesar 10 milyar $ USD. Pada tahun 2020 bahkan hanya sebesar 6 milyar $ USD.

"Lifting minyak kita memiliki visi 1 juta bph (barel per hari) di tahun 2030. Namun anehnya, target lifting tahunan bukannya naik, malah justru terus melorot," ungkapnya.

Target lifting minyak, imbuhnya, tahun 2019, 2020, 2021 dan tahun 2022 masing-masing sebesar 775, 755, 705 dan 704 bph. Terus turun.

"Sementara realisasinya setiap tahun selalu di bawah target. Karena penggunaan BBM terus naik, maka otomatis impor migas tetap membengkak. Alhasil devisa negara terkuras," papar Anggota Komisi VII DPR RI ini.

Di sisi lain, lanjut Mulyanto, kemampuan kilang untuk mengolah BBM secara domestik masih lemah. Hampir 25 tahun sejak pengoperasian RU VII Kasim di Papua pada tahun 1997, tidak ada lagi pembangunan kilang baru.

Pembangunan kilang Bontang tidak jelas juntrungannya. Kilang Tuban, Jawa Timur, masih pada tahap pembebasan lahan. Padahal sudah dimulai sejak tahun 2017.

Dari total 6 buah kilang yang ada, Pertamina baru mampu menghasilkan BBM sebanyak 850 – 950 ribu bph. Setengah dari kebutuhan domestik.

Di sektor ketenagalistrikan, kata Mulyanto, kinerja Pemerintah juga masih merah. Rasio elektrifikasi nasional masih jauh di bawah seratus persen.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Dr. H. MULYANTO, M.Eng
Anggota Komisi VII DPR RI

> "Hingga kini bidang energi nasional masih terpuruk dan belum menunjukan tanda-tanda yang menggembirakan. Prestasinya masih datar-datar saja bahkan cenderung merah"

Wakil Ketua FPKS Tegaskan PR Pemerintah Soal Ekonomi Masih Banyak

KUTIPAN

Jakarta (26/10) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam, menyampaikan analisanya terhadap kondisi perekonomian Indonesia saat ini.

Ecky menyatakan bahwa dalam mengevaluasi capaian pertumbuhan ekonomi, harus didasarkan pada target pertumbuhan menurut APBN 2021 yaitu 5 persen.

"Outlook pertumbuhan 2021, tidak akan jauh di angka sekitar 3,5 persen s.d. 4,0 persen. Artinya diprediksi Pemerintah tidak dapat merealisasikan target pertumbuhan sesuai amanah UU APBN 2021," terang Ecky.

Ecky melanjutkan, sebagai dampak dari misstarget tersebut, secara langsung akan berpengaruh terhadap capaian penerimaan perpajakan pada APBN 2021. Dimana dari target sebesar Rp1.229,6 triliun, shortfall perpajakan diperkiraan dapat mencapai Rp100 triliun.

"Dampak turunan dari hal tersebut adalah, penambahan utang yang dilakukan Pemerintah dalam rangka mempertahankan porsi belanja dan investasinya," ujarnya.

Ecky berpendapat, apabila terjadi shortfall, Pemerintah semestinya mengambil tindakan koreksi terhadap anggaran investasi pada BUMN yang dinilai tidak memiliki daya ungkit tinggi bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Terlebih lagi terhadap BUMN yang justru menjadi beban APBN setiap periodenya.

Berikutnya Ecky juga menyoroti realisasi inflasi. "Indikator inflasi rendah lebih diakibatkan karena daya beli masyarakat yang rendah serta adanya tren penurunan tingkat konsumsi masyarakat berpendapatan menengah ke atas. Dimana mereka lebih memilih spending untuk investasi pada instrumen keuangan derivative, diantaranya saham dan forex, dibanding untuk keperluan yang bersifat konsumtif".

Kemudian terkait sektor keuangan, Ecky menyarankan agar Pemerintah bersama KSSK harus fokus dalam usaha mentransmisikan dana pihak ketiga (DPK) di perbankan menjadi pinjaman/kredit/pembiayaan sektor riil sehingga LDR bisa meningkat dari kisaran 81 persen saat ini.

Ecky menilai kondisi ini sebagai salah satu faktor utama terhambatnya pertumbuhan ekonomi, karena dana banyak mengendap di perbankan.

Hal ini terlihat dari pertumbuhan DPK 2021 diproyeksikan ± 11 persen, sedangkan pertumbuhan kredit hanya ± 6 persen.

''Hal tersebut belum ditambah dengan persoalan kesehatan perbankan, asuransi dan industri keuangan non bank. Meskipun jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2021 terlihat adanya perbaikan, namun belum sebaik saat sebelum terjadinya pandemi,'' Papar Ecky.

Kemudian membahas adanya perbaikan purchasing managers' index (PMI), Ecky menjelaskan bahwa kita patut bersyukur dengan adanya optimisme dan harapan.

"Akan tetapi, momentum ini harus dijaga dengan keseriusan pemerintah dalam menjaga agar tidak terjadi lagi lonjakan kasus Covid-19," ungkapnya.

Pemerintah, kata Ecky, tidak boleh kendor mengedukasi masyarakat untuk menjaga prokes serta menjalankan program vaksinasi nasional secara baik dan benar.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

H. ECKY AWAL MUCHARAM
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI

''Perlu manjadi catatan penting, pertumbuhan ekonomi sangat erat dengan penanganan Covid-19. Hal ini menuntut ketepatan pemerintah membuat kebijakan ekonomi''

Fraksi PKS DPR Kembali Borong Dua Penghargaan Bergengsi Teropong Democracy Award 2021

KUTIPAN

Jakarta (30/10) --- Fraksi PKS DPR RI kembali memborong penghargaan dari Media Nasional Teropong Senayan dalam 2 Kategori bergengsi yaitu (1) Kategori Voice of Democracy untuk Fraksi PKS DPR RI dan (2) Kategori Rising Star of Democracy untuk Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini.

Penghargaan tahunan Teropong Senayan ini selalu menempatkan Fraksi PKS sebagai penerima penghargaan dalam kategori yang bergengsi sejak pertama dihelat beberapa tahun silam.

Fraksi PKS DPR RI dipilih sebagai penerima Voice of Democracy karena dinilai aktif menyuarakan aspirasi rakyat di Parlemen, memiliki kedekatan dengan media, terbuka atas informasi, dan tanggap atas isu-isu aktual nasional dan daerah.

Sementara Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini terpilih memperoleh penghargaan Rising Star of Democracy karena dinilai menjadi figur tokoh politik yang aktif melakukan advokasi dan menunjukkan keberpihakan yang kuat kepada rakyat di lembaga legislatif, aspiratif dan komunikatif kepada masyarakat luas dan media massa sebagai pilar demokrasi.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengucap rasa syukur dan terima kasih karena Fraksi PKS mendapatkan penghargaan dalam dua nominasi sekaligus. Ia berharap penghargaan ini bisa meningkatkan kinerja Fraksi PKS dalam memperkuat demokrasi di Indonesia yang berdampak langsung pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Penghargaan terhadap legislator ini sekaligus diharapkan juga dapat mengokohkan kinerja DPR sebagai wakil rakyat.

"Penghargaan ini untuk seluruh anggota Fraksi PKS di seluruh Indonesia dari pusat hingga daerah agar semakin kokoh dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, kepentingan umat, dan mengokohkan nasionalisme Indonesia," tandas Jazuli.

Anggota Komisi I DPR Dapil Banten ini menegaskan komitmen Fraksi PKS untuk menghadirkan demokrasi yang berkualitas dan subtantif dengan memerankan peran kontrol dan penyeimbang (checks and balances) yang kritis dan konstruktif kepada Pemerintah di Parlemen.

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

> “Penghargaan ini untuk seluruh anggota Fraksi PKS di seluruh Indonesia dari pusat hingga daerah agar semakin kokoh dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, kepentingan umat, dan mengokohkan nasionalisme Indonesia”

"Fraksi PKS konsisten menjadi oposisi yang kritis dan konstruktif terhadap pemerintah agar setiap kebijakan yang diambil tegak lurus terhadap Pancasila dan UUD 1945 serta berpihak kepada kepentingan rakyat," pungkas Jazuli.

Sabet Penghargaan Rising Star and Voice of Democracy

Fraksi PKS Bertekad Perjuangkan Demokrasi Sehat di Indonesia

KUTIPAN

Jakarta (27/10) Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini mendapatkan penghargaan 'Rising Star of Democracy' pada ajang penghargaan Teropong Demokrasi Award 2021 pada Rabu siang (27/10/2021).

"Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Teropong Senayan atas penghargaan dan apresiasi ini. Kita tahu bahwa beberapa tahun ini indeks demokrasi di Indonesia menurun, maka dengan penghargaan ini, semoga bisa membawa harapan baru serta optimisme untuk memperjuangkan demokrasi yang baik dan bersih." Ucap Wakil Sekretaris FPKS DPR RI, Suryadi Jaya Purnama.

Dengan terpilihnya Jazuli sebagai pemenang penghargaan 'Rising Star of Democracy', maka setidaknya sosok legislator tersebut sudah memenuhi kualifikasi membawa aspirasi perubahan untuk masa depan, mendorong demokrasi yang sehat, serta memiliki terobosan guna mewujudkan perubahan nyata bagi demokrasi Indonesia.

Selain itu, Fraksi PKS DPR RI juga berhasil mendapatkan penghargaan 'Voice of Democracy' di ajang penghargaan yang cukup bergengsi tersebut.

Berdasarkan indikator pemenang yang ditentukan oleh juri, maka Fraksi PKS dinilai memenuhi beberapa kriteria, yakni aktif dalam menyalurkan aspirasi rakyat di parlemen, terbuka atas informasi, tanggap terhadap isu-isu daerah serta memiliki hubungan yang baik dengan media.

"Bagi kami, penghargaan ini bukanlah sekedar penghargaan, tapi juga amanah dan tanggung jawab agar Fraksi PKS akan lebih baik lagi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. PKS juga bertekad untuk terus terbuka dan transparan dalam membawa demokrasi yang bersih bagi Indonesia. Salam dari PKS untuk seluruh rakyat Indonesia." Ucap Anggota Komisi V ini.

Dengan diperolehnya penghargaan tersebut, Fraksi PKS juga berkomitmen untuk terus menjaga keterbukaan dengan berbagai lapisan masyarakat demi menyampaikan aspirasi masyarakat kepada parlemen.

H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T.
Wakil Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

"Bagi kami, penghargaan ini bukanlah sekedar penghargaan, tapi juga amanah dan tanggung jawab agar Fraksi PKS akan lebih baik lagi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. PKS juga bertekad untuk terus terbuka dan transparan dalam membawa demokrasi yang bersih bagi Indonesia. Salam dari PKS untuk seluruh rakyat Indonesia."

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Aleg PKS: Pandemi Belum Hilang, Utang Meningkat

KUTIPAN

Jakarta (25/10) --- Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menyebut capaian vaksinasi menjadi catatan yang menonjol di bidang kesehatan selama dua tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'ruf. Merespons hal ini, Anggota DPR RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf angkat bicara.

Bukhori mengingatkan pemerintah agar tidak jemawa. Dirinya mengatakan itu sudah merupakan tanggung jawab pemerintah untuk membereskan masalah kesehatan akibat kelalaiannya di awal merespons risiko wabah di Tanah Air.

Anggota Komisi Kebencanaan DPR ini melanjutkan Indonesia belum sepenuhnya aman dan terbebas dari virus Covid-19, maka terlalu dini apabila pemerintah mengklaim pihaknya berhasil tangani pandemi.

"Jangan menepuk dada terlalu dini. Itu memang sudah kewajiban pemerintah menyelesaikan masalah akibat gagap di awal, sehingga tidak perlu ada glorifikasi," kritiknya.

Melansir Worldometers per 24 Oktober 2021, total kasus di Indonesia sejak awal pandemi telah mencapai 4,2 juta kasus. Angka ini menempatkan Indonesia bertengger di urutan ke-14 dunia sebagai negara dengan kasus Covid-19 tertinggi.

Selain itu, angka kematian di Indonesia akibat virus Covid-19 menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara, yakni mencapai 143.176 kematian.

Menyusul Indonesia terdapat Filipina dengan kasus kematian sebanyak 41.793. Selanjutnya Malaysia dengan 28.354 kasus diikuti oleh Vietnam, Thailand, dan Myanmar masing-masing sebanyak 21.673 kasus dan 18.000-an kasus. Sementara, Singapura dan Brunei hanya mencatat 300 dan 80 kasus kematian.

"Virus Covid-19 telah menelan banyak korban jiwa di Indonesia sejak awal pagebluk. Tercacat, angka kematian di Tanah Air adalah yang paling tinggi bila dibandingkan negara tetangga di kawasan Asia Tenggara," papar Bukhori.

"Rakyat telah membayar harga terlalu mahal akibat inkonsistensi kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi. Sungguh tidak etis menepuk-nepuk dada dengan tangan berlumur darah," tegasnya.

Masih soal catatan di tahun kedua pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, anggota Komisi VIII DPR RI ini juga mengkritik sikap pemerintah yang kukuh mengerjakan sejumlah megaproyek seperti pembangunan sepur cepat Jakarta-Bandung dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan di tengah kondisi pandemi.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

KH. BUKHORI, Lc., M.A.
Anggota Komisi VIII DPR RI

"Jangan sampai bangsa kita tergadai akibat jerat utang yang kontraproduktif. Pemerintah tidak boleh meninggalkan generasi setelahnya dalam keadaan lemah. Maka itu, saya meminta agar sejumlah megaproyek yang tidak prioritas bagi rakyat dibatalkan saja hingga kondisi fiskal kita membaik,

2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, PKS Sorot Utang Tersembunyi RI ke China hingga Penegakan Hukum Lemah

KUTIPAN

Jakarta (21/10) --- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan catatan khusus terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin yang hari ini genap berusia dua tahun.

Salah satu yang disoroti ialah hasil Lembaga Riset Keuangan asal Amerika Serikat bernama AidData yang memperkirakan Indonesia punya utang tersembunyi ke China sebesar Rp245 triliun diduga untuk membiayai berbagai proyek besar pemerintah.

Sebagian besar merupakan pembiayaan pembangunan dalam program Belt and Road Initiative (BRI). Salah satunya kereta cepat Jakarta-Bandung yang menuai polemik.

"Jangan sepelekan temuan ini. Terlebih, dampak dari keputusan yang serba instan dan kejar-tayang, pendanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kini ditanggung APBN," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada Kompas TV, Rabu (20/10/2021).

Selain itu, terkait kinerja penegakan hukum yang melemah. Kepuasan publik menurun dari 65,6% (April) menjadi 59,4% (Oktober) menurut survey Nasional Kompas Oktober 2021.

"Banyaknya kasus pelanggaran hukum yang tidak diselesaikan secara layak patut diduga menjadi penyebab. Seperti kasus dugaan pemerkosaan 3 anak di bawah umur oleh ayah kandung di Luwu Timur (Sulsel) yang membuat polisi membuka kembali kasus ini."

"Juga kasus 'smackdown' mahasiswa si Tangerang mestinya bisa menjadi cambuk peningkatan penedekatan nan humanis demi kepolisian yang presisi," ujarnya.

Kemudian, isu pemberantasan korupsi khususnya yang terjadi di KPK. Yang menjadi perhatian pihaknya adalah amat disayangkannya sikap diamnya Presiden Jokowi saat menangani polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di KPK.

"Polemik TWK KPK dan diamnya Pak Jokowi amat disayangkan. Kepercayaan publik terhadap KPK pun jeblok. Perlu diingat dukungan publik punya nilai strategis bagi KPK," kata dia.

Dr. H. MARDANI, M.Eng
Anggota Komisi II DPR RI

"Banyaknya kasus pelanggaran hukum yang tidak diselesaikan secara layak patut diduga menjadi penyebab. Seperti kasus dugaan pemerkosaan 3 anak di bawah umur oleh ayah kandung di Luwu Timur (Sulsel) yang membuat polisi membuka kembali kasus ini."

Pengurus MUI Jabar: Peran Ulama dan Santri sebagai Jembatan Perbedaan

KUTIPAN

Jakarta (20/10) - Pengurus MUI Jawa Barat Asep Faturakhman, menyampaikan apresiasi kepada tokoh agama yaitu ulama dalam perannya sebagai tauladan baik kepada masyarakat dalam acara Launching Lomba Baca Kitab Kuning Tingkat Nasional 2021 yang diselenggarakan secara virtual pada Rabu (20/10/2021) siang.

Dalam acara tersebut, Asep Faturakhman menyampaikan apresiasi kepada Fraksi PKS selaku panitia acara lomba baca kitab kuning tingkat nasional tahun 2021. Pengurus MUI Jawa Barat tersebut menyampaikan bahwa akibat pandemi Covid-19 serta gugurnya para ulama merupakan sebuah ancaman bagi umat, karena untuk mencetak ulama berkualitas sendiri sangatlah sulit.

"Kita mengetahui bahwa peran da'arul ulama sangat berat, selain menyampaikan risalah ajaran-ajaran Rasulullah SAW, tetapi juga seseorang dengan ilmu, dengan amalnya yang menyampaikan sinar kemilau kepada umat untuk melayani umat", ujar Asep Faturakhman

Peran ulama sudah ada sebelum kemerdekaan Indonesia, tentang bagaimana membangkitkan semangat resolusi jihad.

"Begitu juga pada tanggal 22 Oktober 2015 ditetapkan sebagai hari santri nasional yang kemudian oleh fraksi PKS digalangkan acara lomba baca kitab kuning nasional, merupakan sebuah anugerah resolusi jihad para ulama", tegas pengurus MUI Jawa Barat.

Ulama dan para santri memiliki peranan khususnya dalam menyikapi aliran perbedaan agama. Mengingat perbedaan merupakan rahmat Allah SWT. akan tetapi perbedaan merupakan keniscayaan yang dapat diikat melalui jalinan silaturahmi

"Meski berbeda, akan tetapi kita dapat membingkainya melalui hubungan ukhuwah insaniyah, ukhuwah watoniyah serta ukhuwah islamiyah", Ungkap Asep Faturakhman

Selanjutnya jembatan dalam perbedaan berupa akhlakul karimah, sehingga setiap perbedaan yang terjadi perlu adanya komunikasi yang dapat terjalin.

"Jika seseorang yang memiliki pengetahuan yang luas maka tidak akan dengan mudah menyalahkan yang lain meskipun terdapat perbedaan meskipun dalam lingkup cabang", Ujar Asep Faturakhman.

Dengan demikian, setiap perbedaan akan menemukan titik terang apabila mengedepankan akhlak sekaligus dialog yang berdasarkan pada pengetahuan yang meluas.

"Ulama dan santri harus memiliki pengetahuan yang luas, strategi penyampaian yang tepat. Serta memperhatikan situasi dan kondisi yang sesuai pada zamannya", Ungkap Asep Faturakhman

Toleransi beragama harus dijunjung tinggi, sehingga apabila terdapat perselisihan maka jembatannya pada akhlak dan jiwa ksatria.

"Untuk mencapai win-win solution maka kita harus mengetahui bahwa karakter perlu yang ihsan, dimana tetap bebuat baik meskipun kepada orang yang berbuat jahat", Ujar Asep Faturakhman

Selanjutnya, MUI telah merumuskan 10 kriteria aliran yang menyimpang karena melanggara pokok-pokok agama. Akan tetapi islam mengajarkan akan kebaikan

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Dr. KH. ASEP AHMAD FATHURRAHMAN Lc. M.Ag
Pengurus MUI Jawa Barat

"Ulama dan santri harus memiliki pengetahuan yang luas, strategi penyampaian yang tepat. Serta memperhatikan situasi dan kondisi yang sesuai pada zamannya".

Pengasuh Ponpes Al-Muntaha Al-Kholiliyah:

Lomba Baca Kitab Kuning Naikan Eksistensi Kitab Klasik

KUTIPAN

Jakarta (20/10) --- Pengasuh Pondok Pesantren Al-Muntaha Al-Kholiliyah Bangkalan Madura, Toha Kholili menghadiri acara Launching Lomba Baca Kitab Kuning Nasional ke-5 Fraksi PKS DPR RI 2021 sebagai narasumber Webinar Hari Santri Nasional.

Dalam acara tersebut Toha Kholili mengapresiasi Lomba Baca Kitab Kuning yang diadakan Fraksi PKS DPR RI adalah bentuk membumikan kembali kitab klasik yang sudah tidak lagi terkenal di masyarakat bahkan umat Islam sendiri. Bermunculannya Kitab Tarjamah dapat menggeser eksistensi Kitab Klasik sehingga Kitab Klasik semakin tidak dikenal.

"Minat untuk membaca kitab klasik sudah berkurang bahkan menganggap bahwa kitab kuning sudah tidak lagi mudah untuk dipelajari. Maka dari itu mereka lebih memilih untuk membaca kitab terjemah padahal kitab aslinya adalah kitab-kitab klasik yang lebih lengkap dan terperinci." ujar Toha Kholil.

Toha Kholili juga menambahkan bahwa pembelajaran tentang Kitab Kuning sebaiknya juga dipelajari di sekolah khususnya sekolah yang berlabel Islam Terpadu.

"Maka dari itu hendaknya sekolah yang berlabel Islam mengajarkan dan mengenalkan kitab-kitab klasik. Ini menjadi tugas bagi para Kiyai dan para pengajar Islam untuk membumikan kitab klasik kembali" tambahnya.

Di akhir webinar, Toha Kholili berpesan agar ulama, kiyai, dan para santri dapat menyampaikan wasilah Rasul dengan seimbang dan tidak memihak. Jangan sampai ayat-ayat Allah dijual oleh orang-orang yang tidak paham kitab klasik secara mendalam.

"Ulama sebagai panglima terdepan dalam menjalankan perintah-perintah Allah, jangan sampai banyak orang yang menjual ayat-ayat Allah. Mari kita sampaikan wasilah para Rasul dengan mematuhi aturan Allah agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Wasilah harus disampaikan dengan seimbang dan tidak memihak satu pihak. Maka dari itu ini menjadi tugas besar bagi para kiyai dan santri untuk bisa menyampaikan kebenaran dengan seimbang." tutupnya.

K.H. TOHA KHOLILI
Pengasuh Ponpes Al-Muntaha Alkholiliyah, Bangkalan, Madura, Jatim

"Pembelajaran tentang Kitab Kuning sebaiknya juga dipelajari di sekolah khususnya sekolah yang berlabel Islam Terpadu. Maka dari itu hendaknya sekolah yang berlabel Islam mengajarkan dan mengenalkan kitab-kitab klasik. Ini menjadi tugas bagi para Kiyai dan para pengajar Islam untuk membumikan kitab klasik kembali"

Launching Lomba Baca Kitab Kuning

Dr. Salim: Jadikan Sarana Kokohkan Nasionalisme

KUTIPAN

Jakarta (20/10) --- Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dr. Salim Segaf Aljufri, menekankan pentingnya peran ulama, santri, dan pesantren dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hal tersebut disampaikan dalam acara Launching Lomba Kitab Kuning Nasional ke-V yang diselenggarakan secara virtual pada Rabu (20/10) siang.

Acara ini digelar sekaligus dalam rangka memperingati milad Fraksi PKS DPR RI, Maulid Nabi 1443 H, serta Hari Santri Nasional.

Dalam acara tersebut, Dr. Salim mengapresiasi usaha Fraksi PKS DPR RI yang terus memperjuangkan kepentingan umat, yakni dengan mensyiarkan Kitab Kuning selaku simbol dan rujukan keilmuan pesantren melalui penyelenggaraan Lomba Baca Kitab Kuning serta berbagai kegiatan advokasi kesejahteraan pesantren, seperti mendorong lahirnya RUU Pesantren, dana abadi pesantren dalam APBN, serta menginisiasi RUU perlindungan simbol dan tokoh agama.

"Pesantren sejatinya adalah soko guru pendidikan nasional yang berkontribusi besar dalam membentuk dan menjaga karakter bangsa. Pesantren memimpin dan mencetak banyak tokoh dan pemimpin nasional yang memiliki wawasan kebangsaan yang utuh. Pesantren telah hadir di Nusantara jauh sebelum hadirnya sistem pendidikan nasional dan terus akan eksis, bahkan berkembang di tengah dinamika kemajuan bangsa," ungkap Dr. Salim.

Dalam pidato arahannya tersebut, Dr. Salim juga menyampaikan bahwa Lomba Baca Kitab Kuning yang rutin digelar oleh Fraksi PKS DPR RI merupakan sebuah inisiatif dalam sejarah parlemen Indonesia. Menurutnya, Lomba Baca Kitab Kuning merupakan bentuk penghormatan kepada para ulama dan santri, upaya untuk memotivasi anak bangsa untuk mencintai ilmu, serta semangat untuk mengokohkan nasionalisme Indonesia yang religius.

"Nasionalisme yang dibimbing oleh nilai-nilai Ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana bunyi sila pertama Pancasila dan amanat Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Agama menjadi ruh kebangsaan Indonesia yang harus terus dikokohkan ikatannya, bukan dihadap-hadapkan atau dipertentangkan satu dengan yang lain." Dr. Salim berujar dalam pidatonya.

Ketua Majelis Syuro PKS ini juga berkata bahwa Islam menjadi faktor penting dalam membentuk ke-Indonesiaan karena nilai dan ajarannya yang rahmatan lil alamin serta aktualisasi peran ulama dan santri dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dr. Salim berpesan bahwasanya jangan hilangkan jasa ulama dan umat Islam. Indonesia memang bukan negara agama, dalam arti ada satu agama sebagai agama negara. Tetapi Indonesia adalah negara beragama yang menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

HABIB Dr. SALIM SEGAF ALJUFRI, MA
Ketua Majelis Syuro PKS

"Pesantren sejatinya adalah soko guru pendidikan nasional yang berkontribusi besar dalam membentuk dan menjaga karakter bangsa. Pesantren memimpin dan mencetak banyak tokoh dan pemimpin nasional yang memiliki wawasan kebangsaan yang utuh"

Milad ke-17 dan Peringati Hari Santri

FPKS DPR RI Kembali Gelar Lomba Baca Kitab Kuning

KUTIPAN

Jakarta (20/10) --- Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menyampaikan pentingnya mencintai para ulama, santri, dan juga pesantren yang telah membawa risalah kebaikan kepada bangsa ini dalam kegiatan Launching Lomba Baca Kitab Kuning ke V tingkat Nasional yang digelar secara virtual oleh Fraksi PKS DPR RI, Rabu, (20/10).

"Lomba baca kitab kuning ini merupakan program unggulan dari Fraksi PKS DPR RI, dan ini diselenggarakan pada setiap tahun. Biasanya dilaksanakan dalam kegiatan milad Fraksi PKS DPR RI, juga sekaligus memeriahkan Hari Santri Nasional, pada tahun ini, kebetulan juga sekaligus kita mensyiarkan peringatan Maulid Nabi Nabi Muhammad SAW," Ujar Jazuli

Dalam hal ini, Jazuli menekankan tiga hal penting mengenai kenapa fraksinya mengungguli program tersebut. Pertama Fraksi PKS DPR RI dari pusat hingga daerah ingin membangun tradisi keilmuan yang merujuk kepada para ulama yang mu'tabar dan kompeten, Kedua ingin mengokohkan cinta kepada para ulama dan santri, dan yang Terakhir ingin meneladani para ulama dan santri.

Oleh karena itu, kiprah Fraksi PKS DPR RI dalam mengayomi isu keumatan begitu jelas melalui kontribusi nyatanya untuk membangun Indonesia bersama para ulama, santri, dan juga pesantren melalui diadakannya kegiatan Lomba Baca Kitab Kuning atau Kitab Fathul Muin.

Jazuli juga menegaskan bahwa tidak boleh ada ulama maupun tokoh agama yang dilecehkan ataupun dihina. Karena itu, Fraksi PKS DPR RI mengusulkan sebuah RUU yang awalnya RUU Perlindungan Ulama. Kemudian, setelah diskusi dengan fraksi lain diubah menjadi RUU Perlindungan Tokoh Agama.

"Tidak ada masalah, karena pada hakikatnya seluruh tokoh agama harus kita hormati, harus kita muliakan, agar terjadi persatuan dan kesatuan. Ketika para ulama dihina, ketika tokoh agama dihina, mereka punya pengikut, maka pengikutnya akan tersinggung, otomatis akan melahirkan kegaduhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara" tegas Jazuli

Maka dari itu, tidak lupa Jazuli mengingatkan kepada kita semua bahwa orang-orang yang besar juga terlahir dari didikan para ulama, lembaga studi keislaman yaitu pesantren, dan harus menyayangi para santri untuk membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia.

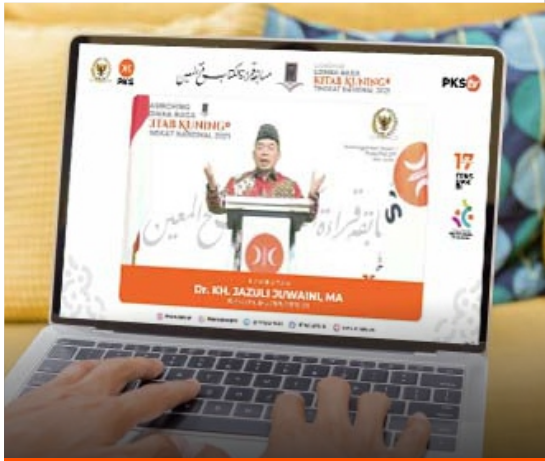

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

"Lomba baca kitab kuning ini merupakan program unggulan dari Fraksi PKS DPR RI, dan ini diselenggarakan pada setiap tahun. Biasanya dilaksanakan dalam kegiatan milad Fraksi PKS DPR RI, juga sekaligus memeriahkan Hari Santri Nasional, pada tahun ini, kebetulan juga sekaligus kita mensyiarkan peringatan Maulid Nabi Nabi Muhammad SAW,"

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Selamat Bertugas

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa

Semoga dapat
mengemban Amanah dengan
sebaik-baiknya

Dr. H. Jazuli Juwaini, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Pimpinan Komisi I DPR Fraksi PKS Prihatin dengan peretasan Situs BSSN

KUTIPAN

Jakarta (25/10) --- Situs Pusat Malware Nasional milik Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN mengalami peretasan berupa perubahan halaman muka atau defacement.

Situs tersebut belum dapat diakses oleh publik hingga Senin (25/10/2021) pukul 10.00 WIB dan hingga siang ini situs Pusat Malware Nasional (Pusmanas) milik BSSN, https://pusmanas.bssn.go.id/, tidak bisa dibuka.

Melihat realitas ini, salah satu Pimpinan Komisi 1 DPR RI dari Fraksi PKS Abdul Kharis Almasyhari mengutarakan keprihatinan mendalam mengingat itu adalah situs Pusat Malware Nasional milik Lembaga BSSSN garda terdepan anti peretasan.

"Saya sangat prihatin atas kejadian yang terjadi pada situs Pusat Malware Nasional (Pusmanas) milik BSSN, https://pusmanas.bssn.go.id/ ini menjadi catatan untuk kami di Komisi 1 DPR RI" ujar Kharis dalam keterangan persnya kepada media, Senin (25/10).

Kharis menekankan kondisi keamanan siber Indonesia yang lemah bukan hanya tergambar dari rentetan kasus kebocoran data penduduk yang terjadi berulang kali dalam beberapa waktu terakhir atau peretasan website milik negara.

Menurut laman National Cyber Security Index (NCSI) pada September kemarin Indonesia berada pada peringkat 77 dari 160 negara di dunia soal keamanan siber nasional. Indonesia tercatat memiliki skor 38,96 dan angka itu jauh di bawah sejumlah negara tetangga Asia Tenggara lainnya.

"Saya harap agar segera dan terus ditingkatkan kemampuan SDM BSSN dengan ditopang infrastuktur dan teknologi yang mumpuni bagi kemanan siber Indonesia secara terintegrasi sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 BSSN menjadi pengampu major project Penguatan National Security Operation Center–Security Operation Center (NSOC-SOC) " tegas Kharis.

Kharis menyadari semua itu perlu di dukung dengan anggaran yang maksimal, oleh karena itu Komisi 1 DPR RI akan terus berupaya agar BSSN yang di bebankan keamanan siber perlu daya dukung optimal.

"Sulit menuju keamanan siber yang tanggung kalau tidak ditopang anggaran yang maksimal, oleh karena itu saya sebagai salah satu pimpinan Komisi I DPR RI mendukung penuh peningkatan anggaran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), yang dimana teruang dalam RPJMN BSSN " tandas Legislator Dapil Jawa Tengah V itu.

Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI
Wakil Ketua Komisi I DPR RI

"Sulit menuju keamanan siber yang tanggung kalau tidak ditopang anggaran yang maksimal, oleh karena itu saya sebagai salah satu pimpinan Komisi I DPR RI mendukung penuh peningkatan anggaran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), yang dimana teruang dalam RPJMN BSSN "

Anggota Komisi I FPKS: Jadilah Pahlawan Masa Kini dengan Gadget yang Kita Miliki

KUTIPAN

Jakarta (20/10) --- Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Syaikhu mengajak anak muda untuk berkontribusi kepada masyarakat dengan membuat konten-konten yang positif lewat gadget yang mereka miliki.

"Sebagai anak bangsa, kemampuan atau skill membuat konten positif dan kreatif sepertinya sudah menjadi kewajiban. Ini medan juang baru untuk ikut berkontribusi kepada masyarakat, bangsa dan negara. Jadilah pahlawan masa kini dengan gadget yang kita miliki," ajak Syaikhu dalam sambutannya di acara Webinar Aptika Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) kerjasama dengan Komisi I DPR RI , Senin (18/10/2021).

Syaikhu mengingatkan agar kehadiran internet bisa membawa manfaat maka harus diisi dengan konten-konten positif tersebut.

"Kita harus melakukan langkah-langkah untuk meminimalisasi efek negatif dari internet, salah satu caranya dengan membuat konten positif dan kreatif. Saat ini kata konten jadi akrab di telinga kita, bahkan ada kalimat 'Tiada Hari Tanpa Konten'," ungkap Syaikhu.

Syaikhu menjelaskan internet yang menghadirkan berbagai macam media sosial ini ibarat ruang bebas, akan menjadi masalah besar jika ruang bebas tersebut sebagian besar berisikan konten negatif.

"Untuk itu, menjadi sebuah kebutuhan hadirnya konten positif dan kreatif yang isinya mencerdaskan, membawa semangat perubahan, inspiratif dan tidak hoaks," jelas Syaikhu.

Syaikhu menyebutkan beberapa contoh anak muda yang sudah bisa berkontribusi dengan memberikan inspirasi lewat konten positifnya di media sosial, salah satunya Gamal Albinsaid yang merupakan Ketua Bidang Kepemudaan DPP PKS.

"Kita bisa mengikuti jejak mereka. Kuncinya adalah kemauan, semangat dan disiplin serta tanggung jawab. Jika karakter ini dimiliki, insya Allah jempol kita akan menghasilkan narasi, foto hingga video yang mampu mengubah jalan hidup orang ke arah yang lebih baik, sekaligus meredam konten negatif yang ada di media sosial," pesan Syaikhu.

Sambutannya tersebut ditutup dengan sebuah pantun:

Beli telur di pasar
tradisional / Pulangnya mampir
di toko otomotif / Mari warnai
jagad media sosial / Dengan
konten positif dan kreatif.

H. AHMAD SYAIKHU
Anggota Komisi I DPR RI

"Sebagai anak bangsa, kemampuan atau skill membuat konten positif dan kreatif sepertinya sudah menjadi kewajiban. Ini medan juang baru untuk ikut berkontribusi kepada masyarakat, bangsa dan negara. Jadilah pahlawan masa kini dengan gadget yang kita miliki,"

Anggota Komisi I FPKS Dukung ASEAN Ambil Sikap Tegas terhadap Junta Myanmar

KUTIPAN

Yogyakarta (19/10) --- ASEAN berencana tidak akan mengundang Junta Militer Myanmar ke KTT yang akan digelar pada pada 26-28 Oktober mendatang, menyusul sikap Junta yang tidak selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia.

Anggota Komisi I DPR RI, Selasa (19/10) melalui telepon seluler menyatakan sejak awal pihaknya mendesak agar Junta Myanmar bertindak demokratis dan sejalan dengan nilai kemanusiaan.

"Saya mendesak Junta Myanmar bertindak sejalan dengan kemanusiaan dan demokrasi, agar Myanmar layak menjadi Anggota ASEAN. Tindakan brutal Junta yang menyebabkan banyak korban masyarakat sipil serta kudeta terhadap pemerintahan yang sah sesuai hasil Pemilu sangat tidak sejalan dengan semangat berdirinya ASEAN dulu yang di antaranya untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan. Junta juga tidak menunjukkan komitmen menjalankan lima konsensus yang disepakati dalam KTT sebelumnya di Jakarta. Karena Junta 'ndableg', saya mendukung ASEAN untuk ambil sikap tegas terhadap Junta."

Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) ini menjelaskan pada KTT sebelumnya, disepakati lima poin konsensus, yaitu kekerasan di Myanmar harus segera dihentikan; dialog konstruktif untuk mencari solusi damai; ASEAN akan memfasilitasi mediasi.

"ASEAN harus diberikan akses untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Myanmar melalui AHA Center; dan ASEAN juga bakal mengirimkan utusan khususnya ke Myanmar," ungkapnya.

Doktor lulusan Inggris ini menegaskan konsensus-konsensus ini merupakan pengejawantahan nilai-nilai ASEAN yang konstruktif terhadap penjagaan perdamaian dan stabilitas kawasan. Namun, sikap Junta juga tidak berubah. Karena itu, ASEAN harus menempuh cara lain.

"Opsinya bisa dengan melakukan embargo ekonomi dan politik. Ini merupakan prinsip Responsibility to Act. Embargo ekonomi terhadap Myanmar diberlakukan hingga terhadap barang yang merupakan sumber pendapatan utama Myanmar," papar Sukamta.

Embargo politik, kata Sukamta, salah satunya dengan mengucilkan Myanmar seperti tidak diundangnya Junta dalam KTT mendatang.

"Jika opsi tersebut tidak berdampak secara konstruktif terhadap upaya perdamaian di Myanmar, maka ASEAN perlu memikirkan tindakan lebih tegas, misalnya dengan mencabut status keanggotaan Myanmar di ASEAN. Lebih pogresifnya, KTT ASEAN ke depannya perlu meninjau ulang asas non interference supaya ASEAN bisa punya kewenangan lebih menindak anggotanya yang tidak mematuhi aturan-aturan ASEAN," tegas Wakil Ketua Fraksi PKS ini.

H. SUKAMTA, Ph.D
Anggota Komisi I DPR RI

> "Saya mendesak Junta Myanmar bertindak sejalan dengan kemanusiaan dan demokrasi, agar Myanmar layak menjadi Anggota ASEAN. Tindakan brutal Junta yang menyebabkan banyak korban masyarakat sipil serta kudeta terhadap pemerintahan yang sah sesuai hasil Pemilu sangat tidak sejalan dengan semangat berdirinya ASEAN dulu yang di antaranya untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan"

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

DPR Minta Temuan Kecurangan dalam Seleksi CASN Diinvestigasi

KUTIPAN

Jakarta (28/10) --- Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera, angkat bicara mengenai adanya temuan kecurangan dalam proses seleksi Aparatur Sipil Negara seperti yang diungkapkan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Menurut Mardani, apabila memang terjadi kecurangan, maka itu dapat dikatakan bencana dalam proses rekrutmen.

Adanya kecurangan itu, kata dia, dapat merusak sistem yang telah dibangun selama ini dalam proses rekrutmen calon aparatur sipil negara atau CASN. Padahal seleksi CASN dilakukan secara ketat untuk menghasilkan ASN yang berkualitas.

"Ini bencana jika benar terjadi karena merusak sistem yang sudah dibangun dan tidak menghasilkan ASN berkualitas," kata Mardani, Selasa, 26 Oktober 2021.

Mardani meminta pihak terkait untuk melakukan investigasi mengenai temuan ini, selain itu juga mesti ada yang bertanggung jawab atas masih adanya kecurangan dalam proses rekrutmen ASN. Permasalahan ini, kata Mardani, akan didalami lagi pada saat Rapat Komisi II dengan BKN setelah reses nanti.

Mesti ada investigasi dan ada yang bertanggung jawab. BKN pun harus segera ambil inisiatif investigasi. Insya Allah kami akan bawa dalam RDP dengan BKN di Komisi II," ujarnya.

Ada Peserta yang Curang

Badan Kepegawaian Negara mengungkapkan masih adanya peserta yang curang dalam seleksi Calon Aparatur Sipil Negara pada 2021, baik CPNS maupun PPPK.

BKN pun menyayangkan adanya upaya indikasi kecurangan tersebut yang terdeteksi di Titik Lokasi (Tilok) Mandiri Instansi Pemerintah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah.

Menindaklanjuti hal tersebut, BKN berkolaborasi dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan Badan Siber dan Sandi Negara. Selain itu juga didukung penuh oleh Panitia Seleksi Nasional pengadaan CASN Tahun 2021 untuk melakukan penyelidikan atas dugaan kecurangan tersebut.

Dari hasil penyelidikan, BKN bersama BSSN menemukan adanya indikasi kecurangan pada pelaksanaan SKD CASN di Tilok Mandiri Instansi Pemerintah Kabupaten Buol.

Dr. H. MARDANI, M.Eng
Anggota Komisi II DPR RI

“Adanya kecurangan itu, kata dia, dapat merusak sistem yang telah dibangun selama ini dalam proses rekrutmen calon aparatur sipil negara atau CASN. Padahal seleksi CASN dilakukan secara ketat untuk menghasilkan ASN yang berkualitas.”

Aleg PKS: Polisi Sepanjang Masa Harus Humanis

KUTIPAN

Jakarta (26/10) — Legislator Fraksi PKS Adang Daradjatun menyoroti faktor kultural di dalam tubuh Polri sebagai penyebab utama berbagai kasus kekerasan aparat kepolisian yang belakangan ini viral. Hal tersebut disampaikannya dalam segmen berita iNews pada Selasa (26/10) lalu.

"Kebetulan tahun 97-98, saya sebagai Ketua Tim Reformasi Polri, di mana pemisahan Polri dari ABRI, dan juga kita mengeluarkan suatu ketetapan tentang perubahan Polri dalam bidang instrumen, struktur, dan kultur Polri. Instrumen sudah selesai dengan adanya undang-undang Polri , struktur sudah dipekuat mulai dari mabes, polda , polres , polsek dan sebagainya berupa material dalam tugas tugas kepolisian . Nah, yang menjadi masalah utama pada akhirnya tentang kultur, baik dalam konteks kultur masyarakat, lebih-lebih kultur yang berhubungan dengan kepolisian," ungkap Adang.

Anggota Komisi III DPR RI tersebut melanjutkan bahwa masalah kultur ini sangat membutuhkan perhatian dari Pimpinan Polri untuk menyikapi program yang sudah dibuat pada saat Reformasi tentang perubahan kultur anggota Polri. Salah satu usaha yang banyak dilakukan adalah melalui reformasi pendidikan kepolisian yang semula banyak bersifat fisik kini mengarah pada pembekalan anggota Polri untuk bisa melayani masyarakat dan menegakkan hukum sebaik-baiknya dan humanis.

"Kalau dipertanyakan tentang kenapa kekerasan masih terjadi, terus terang ini masih berproses. Banyak masalah sosial lain yang ada dalam lingkungan kehidupan Polri," sambungnya.

Terlepas dari keberadaan badan pengawas seperti Itwasum, Propam, dan Kompolnas, kasus kekerasan di tubuh Polri masih terjadi secara internal maupun eksternal. Menurut Adang, salah satu solusi yang bisa ditempuh adalah berfokus pada pembinaan yang bersifat ke dalam atau internal. Hubungan antara pimpinan dengan anak buah harus terjalin untuk membentuk subsistem-subsistem yang baik dan secara makro menghasilkan sistem yang baik pula.

"Maksud saya bukan mengecilkan arti Itwasum, Propam, maupun Kompolnas, tapi lebih kepada mental, tentang bagaimana pemimpin disetiap level untuk dia mampu memberikan suatu pendidikan santiaji, contoh yang baik kepada anggota sehingga terbangun budaya. Jadi budaya tidak bisa dibangun dengan perintah perintah saja , atau dengan kekerasan, tapi lebih kepada " contoh," pungkas Adang.

Adang berharap agar polisi lebih memperhatikan bagaimana pandangan masyarakat terhadap kasus-kasus dan kultur kekerasan tersebut dengan serius. Pengawasan masyarakat adalah hal yang penting yang sesuai dengan cita-cita reformasi kepolisian pada tahun 97-98 lalu, yakni untuk membentuk kepolisian yang civil dan humanis sepanjang masa.

Drs. H. ADANG DARADJATUN
Anggota Komisi III DPR RI

"Terlepas dari keberadaan badan pengawas seperti Itwasum, Propam, dan Kompolnas, kasus kekerasan di tubuh Polri masih terjadi secara internal maupun eksternal. Salah satu solusi yang bisa ditempuh adalah berfokus pada pembinaan yang bersifat ke dalam atau internal. Hubungan antara pimpinan dengan anak buah harus terjalin untuk membentuk subsistem-subsistem yang baik dan secara makro menghasilkan sistem yang baik pula."

Terkait Oknum Anggota Kepolisian yang Indisipliner

Habib Aboe Dukung Sikap Tegas Kapolri

KUTIPAN

Jakarta (28/10) --- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Aboebakar Al-Habsy menanggapi sejumlah oknum Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan tindakan di luar batas kewajaran.

"Kita mendukung sikap tegas Kapolri, saya kira memang itu yang dibutuhkan saat ini. Ketika banyak dinamika oknum Anggota yang negatif, memang diperlukan kepemimpinan yang kuat agar meningkatkan kedisiplinan personel," ungkap pria yang kerap disapa Habib Aboe ini.

Dengan pesan yang kuat dari Kapolri tersebut, lanjut Habib Aboe, setiap unit kerja dalam tubuh Polri diharapkan akan lebih mampu mengelola personelnya dengan baik. Sehingga akan dapat dihindarkan berbagai peluang tindakan indisipliner.

"Ada dua langkah yang bisa dilakukan untuk meminimalisir tindakan indisipliner oleh Anggota. Pertama, dapat dilakukan pembinaan spiritualitas, misalkan saja melalui pengajian rutin atau ceramah rohani. Melalui cara ini diharapkan akan bisa meningkatkan integritas dan kinerja personel," ujar Sekjend DPP PKS ini.

Kedua, imbuhnya, dapat dioptimalisasi mekanisme pengawasan internal. Sehingga dapat meningkatkan kepatuhan personel terhadap prosedur dan aturan internal.

"Selain itu, melalui pengawasan internal diharapkan akan bisa meningkatkan kedisiplinan anggota. Kepatuhan terhadap prosedur dan kedisiplinan yang tinggi diyakini akan membuat kinerja Polri akan semakin lebih baik lagi," tutup Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan ini.

HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI
Anggota Komisi III DPR RI

“Kita mendukung sikap tegas Kapolri, saya kira memang itu yang dibutuhkan saat ini. Ketika banyak dinamika oknum Anggota yang negatif, memang diperlukan kepemimpinan yang kuat agar meningkatkan kedisiplinan personel”

Kunker Komisi IV, Andi Akmal Minta Gudang Bulog Upgrade Lagi Teknologi Mesin

KUTIPAN

Kabupaten Makassar (20/10) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin pada kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Gudang Bulog Baru (GBB) Panaikang, di Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan meminta agar teknologi mesin rice to rice nya dapat lebih di Upgrade lagi.

Akmal menandaskan bahwa teknologi yang dipakai dalam mengelola beras pada sistem pergudangan ini tidak terlalu canggih. Namun demikian, untuk memenuhi kebutuhan saat ini sudah sangat mencukupi.

Untuk kedepannya, Akmal menyarankan agar mengkondisikan dengan teknologi yang ada, mampu membuat beras yang biasa menjadi beras premium. Seiring perkembangan waktu yang terus berjalan, proses-proses ini harus dilakukan sehingga Bulog mampu memenuhi seluruh segmen masyarakat yang kebutuhan berasnya berbeda-beda.

"Teknologi mesin rice to rice yang beroperasi di Gudang Bulog Baru Panaikang Makassar ini tidak terlalu canggih, namun memang sesuai dengan kebutuhan. Ke depan Andi meminta Bulog untuk dapat membuat sendiri mesin tersebut, agar tidak perlu lagi impor. Ini juga berlaku pada seluruh gudang bulog yang tersebar di Indonesia sehingga ada keseragaman kualitas beras yang dimiliki pemerintah melalui Bulog", tutur Akmal.

Anggota DPR RI asal Sulawesi Selatan II ini mengakui bahwa memang seharusnya Bulog memiliki diversifikasi yang berkaitan dengan hilirisasi pertanian Indonesia, mengingat saat ini Bulog hanya menampung gabah petani sebesar 10 persen, dan dirinya berharap dengan adanya teknologi mesin rice to rice ini dapat menaikkan harga jual beras petani yang kebanyakan medium menjadi beras premium.

Politisi PKS ini menambahkan, Bulog mesti dapat juga melayani beras Bansos yang selama ini bukan dari Bulog. Menurutnya, Bulog ada pekerjaan besar yang nanggung dilakukan, pada persoalan distribusi yang belum maksimal. Harmonisasi kinerja BULOG, pemerintah daerah, pemerintah pusat masih perlu peningkatan kualitas sehingga ujungnya, pelayanan kepada masyarakat semakin baik.

"Saya berharap, Indonesia Timur ini mulai dari Sulawesi hingga Papua, kebutuhan berasnya mayoritas dapat dipenuhi oleh kawasan Sulawesi Selatan. Sedangkan Indonesia Tengan dan Barat, dapat di penuhi oleh pulau Jawa. Untuk itu, Gudang Bulog Baru (GBB) Panaikang, di Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dapat meningkatkan kualitasnya dengan berbagai inovasi sehingga nutrisi yang terkandung pada beras yang diolah terjaga dengan baik", tutup Andi Akmal Pasluddin.

Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M
Anggota Komisi IV DPR RI

"Teknologi mesin rice to rice yang beroperasi di Gudang Bulog Baru Panaikang Makassar ini tidak terlalu canggih, namun memang sesuai dengan kebutuhan. Ke depan Andi meminta Bulog untuk dapat membuat sendiri mesin tersebut, agar tidak perlu lagi impor. Ini juga berlaku pada seluruh gudang bulog yang tersebar di Indonesia sehingga ada keseragaman kualitas beras yang dimiliki pemerintah melalui Bulog"

Aleg PKS Ingin Pelaku UKM Masuk e-Catalog Bidang Sumber Daya Air (SDA) dan Bina Marga

KUTIPAN

Tasikmalaya (20/10) --- Dalam upaya melakukan modernisasi pengadaan barang dan jasa di sektor konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meluncurkan Katalog elektronik (e-catalog) Sektoral pengadaan barang dan jasa Bidang Sumber Daya Air (SDA) dan Bina Marga.

Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat berharap e catalog yang dirilis tersebut dapat mempercepat Pembangunan Infrastruktur. Terutama di sektor konstruksi agar lebih efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing dan akuntabel.

"Saya ingin supaya Katalog elektronik sektoral yang diluncurkan Kementerian PUPR dapat mempercepat kegiatan pengadaan barang dan jasa di lembaga ini. Sekaligus menjadikan prosesnya lebih transparan," ucap Politisi asal PKS.

Toriq menyebutkan khusus di bidang SDA dan Bina Marga Kementerian PUPR terdapat sebanyak 12 penyedia jasa yang ditetapkan memenuhi syarat sebagai penyedia jasa komoditas mobile pump, komoditas jalan jembatan dan komoditas preservasi jalan.

Dan Toriq menilai e-Catalog sektoral yang baru diluncurkan tersebut seperti masih didominasi oleh pelaku Usaha Besar. Toriq tidak ingin pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang tersebar di berbagai daerah akan kesulitan bersaing dalam menawarkan produk barang dan jasanya.

"Sebaiknya Kementerian juga memberikan peluang partisipasi ke semua pelaku usaha disetiap level. Dalam hal keikusertaan pengadaan barang Pemerintah melalui e-Catalog. Saya kira perlu perbaikan kedepannya. Demi terwujudnya persaingan usaha yang sehat. Khususnya untuk pelaku usaha kecil dan menengah (UKM)," tuturnya.

Menurut Toriq, dimasa pandemi, Kementerian PUPR merupakan lembaga yang diharapkan mampu memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia kembali stabil dan terus bertumbuh lewat pembangunan infrastruktur. Diantaranya dengan meningkatkan persaingan usaha yang sehat dan adil di bidang jasa konstruksi.

"Saya berharap Kementerian PUPR terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha agar tercipta kondisi persaingan usaha yang sehat dan adil demi meningkatkan minat investasi di Indonesia," tutupnya.

KH. TORIQ HIDAYAT, Lc
Anggota Komisi V DPR RI

"Sebaiknya Kementerian juga memberikan peluang partisipasi ke semua pelaku usaha disetiap level. Dalam hal keikusertaan pengadaan barang Pemerintah melalui e-Catalog. Saya kira perlu perbaikan kedepannya. Demi terwujudnya persaingan usaha yang sehat. Khususnya untuk pelaku usaha kecil dan menengah (UKM),"

Aleg PKS : Tabrakan LRT Timbulkan Kekhawatiran di Tengah Masyarakat

KUTIPAN

Peristiwa tabrakan tersebut terjadi ketika menjalani pengujian beban dinamis pada bentang panjang yang terletak di jalan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR).

Jakarta (26/10) --- Anggota Komisi V dari Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama menyoroti peristiwa tabrakan rangkaian kereta LRT antara Stasiun Harjamukti, Stasiun Ciracas, Jakarta Timur, yang terjadi pada Senin (25/10/2021).

"Jangan sampai kejadian kecelakaan yang terjadi pada saat tahapan ujicoba justru membuat menurunnya minat masyarakat untuk mencoba LRT sebagai alternatif moda transportasi." tegas Legislator PKS ini.

Peristiwa tabrakan tersebut terjadi ketika menjalani pengujian beban dinamis pada bentang panjang yang terletak di jalan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR). Diberitakan pada saat pengujian tersebut bahwa satu rangkaian kereta yang akan langsir menabrak rangkaian kereta lain, sehingga menyebabkan satu korban luka ringan yaitu masinis PT INKA yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit.

Pengujian itu sendiri dilakukan sebagai bagian dari rangkaian pekerjaan yang mencakup penyambungan lintasan, pembangunan fisik stasiun, jalur layang, lintasan rel, serta persinyalan. Dimana hingga akhir September 2021. Progres pembangunan prasarana LRT jabodetabek secara keseluruhan telah mencapai 87,54%.

"Sudah seharusnya pemerintah dan penyelenggara LRT memberikan perhatian khusus pada proses uji coba."ujar Suryadi.

Lebih lanjut lagi PKS meminta agar proses ujicoba dilakukan berdasarkan prosedur yang ketat serta hati-hati dengan memperhatikan sistem komunikasi data serta seluruh sistem persinyalan lainnya.

"Perlu adanya investigasi secara menyeluruh terhadap peristiwa ini serta hasilnya perlu disampaikan ke publik untuk menenangkan masyarakat sebelum LRT beroperasi." pungkas Suryadi.

H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T
Anggota Komisi V DPR RI

Perlu adanya investigasi secara menyeluruh terhadap peristiwa ini serta hasilnya perlu disampaikan ke publik untuk menenangkan masyarakat sebelum LRT beroperasi

Syarat Tes PCR untuk Naik Pesawat, Legislator PKS: Standar dan Studinya Tidak Jelas

KUTIPAN

Jakarta (29/10) — Legislator Fraksi PKS Sigit Sosiantomo berharap Pemerintah mengkalkulasi kembali dan dapat membatalkan Surat Edaran Nomor 88 Tahun 2021 yang mewajibkan hasil tes PCR sebagai syarat penerbangan domestik

Hal tersebut ia sampaikan dalam acara PKS Legislative Corner yang digelar secara virtual pada Jumat (29/10) siang.

"Surat Edaran itu memang kita tidak tahu, mungkin orang Jawa bilang itu ujug-ujug saja muncul. Kami melihat akhir-akhir ini untuk angkutan udara di Jawa dan Bali itu cukup dengan antigen saja karena PPKM levelnya sudah rendah, tapi tiba-tiba ada Surat Edaran Nomor 88 Tahun 2021. Saya kira ini berlawanan dengan tugas negara yang berusaha menyejahterakan dan memudahkan urusan dan kepentingan rakyat," Sigit memaparkan.

Anggota Komisi V DPR RI tersebut menjelaskan lebih lanjut bahwa PCR akan menyusahkan masyarakat karena beberapa faktor, mulai dari ketersediaannya yang tidak merata di seluruh wilayah Indonesia, masa berlakunya yang terlalu singkat, serta harganya yang relatif mahal. Hal tersebut akan merugikan masyarakat, terlebih mengingat aturan dalam Surat Edaran ini rencananya akan diterapkan ke seluruh moda transportasi.

"Di Jawa sudah PPKM level 1. Kalau PPKM level 1 saja diwajibkan PCR, lalu untuk apa kriteria level tersebut? Mestinya ketika PPKM level 1 kita cukup pakai antigen saja, atau bahkan tidak pakai tes Covid lagi. Hampir 60 persen menurut data warga Indonesia sudah divaksinasi. Lalu, gunanya apa vaksinasi?" ungkapnya dalam acara bertajuk "PCR Melejit, Rakyat Menjerit" itu.

Sigit menyarankan Pemerintah semestinya mencontoh negara seperti Amerika dengan membuat peta wilayah penyebaran risiko Covid untuk menilai wilayah mana saja yang membutuhkan pemberlakuan syarat tes Covid. Sigit juga menyinggung tentang perkataan Presiden bahwa Indonesia akan masuk ke era New Normal, di mana kita akan hidup seperti biasa dengan tetap mempraktikkan protokol kesehatan.

Adapun alasan utama Pemerintah melalui Kemenhub mensyaratkan hasil tes PCR untuk penerbangan domestik adalah terkait rencana peningkatan kapasitas pesawat. Padahal, menurut penelitian IATA (International Air Transport Association), transportasi udara merupakan salah satu moda transportasi yang paling aman dari penyebaran Covid.

"PCR bukan alat untuk menjaga tidak tersebarnya Covid lagi, tapi menurut saya memperbanyak vaksin. Itu sudah sesuai dengan standar WHO. WHO saja hanya mensyaratkan antigen kalau sudah vaksin dua kali. Jadi kita mau ikut standar mana sih, sebetulnya? SE itu rujukannya mau standar apa?" tandas Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur I tersebut.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO
Anggota Komisi V DPR RI

"PCR bukan alat untuk menjaga tidak tersebarnya Covid lagi, tapi menurut saya memperbanyak vaksin. Itu sudah sesuai dengan standar WHO. WHO saja hanya mensyaratkan antigen kalau sudah vaksin dua kali. Jadi kita mau ikut standar mana sih, sebetulnya? SE itu rujukannya mau standar apa?"

UTANG MENUMPUK
GARUDA TERPURUK

PKS Usul Bentuk Pansus ! Usut Tuntas Pihak Yang Merugikan Garuda

- Utang Garuda per 30 September 2021:
  Rp140 Triliun
- Utang meningkat sebesar
  Rp 1,5-2 Triliun
  setiap bulannya
- Ekuitas Negatif (kewajiban lebih besar daripada aset)
  Rp40 Triliun

Penyebab pembengkakan utang

- Tindak koruptif oknum manajemen lama Garuda
- Pandemi Covid-19

Ada Apa dengan Garuda?

- Rasio biaya sewa terhadap pendapatan **24,7%** atau **4x** lipat lebih tinggi dari rata-rata global

- **Penggelembungan jumlah pesawat yang disewa**, yakni 142 unit dari kebutuhan riil 41 unit
- **Penggelembungan harga sewa** $1,4 juta/bulan per pesawat dari harga wajar $750 ribu/bulan per pesawat.
- **Pemborosan keuangan** untuk membiayai gaya hidup direksi dan komisaris

4 opsi pemerintah dalam mengatasi krisis yang menimpa Garuda

- Memberikan pinjaman atau suntikan modal
- Menggunakan hukum perlindungan kebangkrutan untuk merestrukturisasi perusahaan
- Restrukturisasi Garuda dan mendirikan perusahaan maskapai nasional baru
- Melikuidasi Garuda

PKS TV DPR RI | FPKS DPR RI | fraksipksdprri | @fpksdprri | @fpksdprri | **INFOGRAFIS** : Aditya A | **SUMBER** : RDP & Raker Komisi VI

Garuda Pailit, Politisi PKS: Pilihan Terakhir yang Begitu Menyakitkan

KUTIPAN

Jakarta (27/10) --- Menanggapi opsi yang ditawarkan Pemerintah dalam penyelesaian kasus yang membelit PT Garuda Indonesia, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak menilai hal itu merupakan pilihan terakhir meskipun menyakitkan.

Bagaimanapun, kata Amin, Negara tidak boleh terus menerus dirugikan akibat buruknya manajemen Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Karena itu, menurut Amin, penyelesaian kasus Garuda jangan hanya fokus pada keberlanjutan usaha atau bisnisnya semata, namun juga harus ada shock terapy terhadap mereka yang menyebabkan krisis dengan membawanya ke ranah hukum.

Menurut Amin, penyebab krisis akut di tubuh Garuda tidak terlepas dari dampak moral hazard yang dilakukan pengelola di era sebelum sekarang, baik direksi maupun komisaris.

"Saya minta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi terhadap PT Garuda Indonesia" tegasnya.

Opsi Pailit

Sementara itu, terkait opsi penyelamatan Garuda, Amin menilai kondisi keuangan PT Garuda Indonesia saat ini memang sangat berat.

Hingga Juni 2021 lalu Garuda masih memiliki utang senilai Rp 70 triliun. Utang Garuda akan terus membengkak karena setiap bulan PT Garuda Indonesia secara konsolidasi menderita kerugian sebesar US$ 100 juta atau setara Rp1,4 triliun pada kurs Rp14.000 per US dollar.

Berdasarkan keterangan Direksi Garuda saat RDP dengan komisi VI Juni lalu, sumber kerugian antara lain karena Garuda dibebani oleh 101 pesawat sewaan yang kondisinya menganggur (Unutilized asset) dari jumlah 142 pesawat dengan total fixed cost sebesar US$ 82 juta per bulan atau setara Rp1,16 triliun.

Padahal market saat ini hanya memerlukan 41 pesawat saja. Sementara fixed cost untuk 101 pesawat harus tetap dibayarkan dan menjadi utang jika tidak dibayar. Padahal pesawat-pesawat tersebut tidak menghasilkan revenue.

"Untuk BBM saja, Garuda Indonesia juga memiliki tunggakan utang BBM ke Pertamina sebesar Rp 12 triliun," ujarnya.

Gugatan Eksternal

Garuda saat ini juga harus menghadapi gugatan pailit dari sejumlah perusahaan. Diantaranya gugatan dari PT Mitra Buana Korporindo terkait utang dengan gugatan sebesar US$ 4,78 milyar atau hampir Rp70 triliun. Kemudian PT My Indo Airlines terkait tunggakan pembayaran layanan kargo dengan gugatan sebesar US$ 700.539 atau hampir Rp10 milyar.

Selanjutnya gugatan datang dari PT Aircraft Ireland Limited dari negara bagian New South Wales, Australia terkait pembayaran sewa pesawat, juga dari Helice dan Atterisage (Goshawk) di Pengadilan Arbitrase Internasional London terkait pembayaran sewa pesawat.

Melihat fakta-fakta diatas, upaya penyelamatan Garuda memang sangat sulit. Jika negosiasi restrukturisasi utang maupun restrukturisasi sistem sewa (leasing) pesawat menemui jalan buntu, maka pailit menjadi pilihan yang sulit dihindarkan.

"Tidak mungkin semua beban Garuda tersebut diselesaikan lewat Penyertaan Modal Negara (PMN), terlebih kondisi APBN saat ini juga sangat berat," kata Amin.

AMIN AK,M.M.
Anggota Komisi VI DPR RI

"Penyebab krisis akut di tubuh Garuda tidak terlepas dari dampak moral hazard yang dilakukan pengelola di era sebelum sekarang, baik direksi maupun komisaris. Saya minta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi terhadap PT Garuda Indonesia"

Harga Pertalite Diwacanakan Naik

Aleg PKS: Pemerintah Jangan Paksa Rakyat Beri Subsidi Pertamina

KUTIPAN

Jakarta (28/10) --- Meskipun harga minyak dunia saat ini naik, Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Pemerintah tidak latah mewacanakan penyesuaian harga jual BBM, terutama jenis Pertalite.

Menurutnya Pemerintah melalui Kementerian ESDM harus menghentikan wacana kenaikan harga BBM jenis Pertalite. Sebab wacana itu akan membuat masyarakat resah.

"Fraksi PKS pasti menolak rencana kenaikan itu. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk menaikan harga jual BBM jenis Pertalite. Karena saat ini pandemi belum usai dan daya beli masyarakat masih lemah," kata Mulyanto.

Mulyanto menilai selama ini Pemerintah terlalu berpihak pada Pertamina dalam hal kenaikan harga jual BBM.

"Dulu ketika harga BBM anjlok di awal Pandemi Covid-19, Pemerintah menyetujui Pertamina tidak menurunkan harga jual BBM. Alasannya agar kerugian Pertamina tidak terlalu dalam, sehingga BUMN ini tetap dapat menjalankan penugasan Pemerintah di sisi hulu migas," ungkapnya.

Saat itu, imbuh Mulyanto, harga BBM yang harusnya turun malah dijual dengan harga biasa tanpa penyesuaian. Padahal di negara-negara ASEAN harga jual BBM diturunkan.

"Sekarang ketika, harga BBM mulai merambat naik, Pemerintah justru mewacanakan kenaikan BBM dengan menggunakan logika yang serupa. Tentu tidak adil bagi masyarakat," tegas Mulyanto.

Secara umum, lanjut Mulyanto, PKS mendukung upaya Pertamina memperbaiki kondisi keuangan perusahaan. Sebab BUMN pada prinsipnya dibentuk untuk melayani masyarakat pada cabang-cabang usaha penting dan strategis, seperti sektor migas ini.

"Tujuannya, agar pengelolaan sumber daya alam benar-benar diarahkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Tapi BUMN dibentuk bukan sekedar untuk mencari untung, karena negara tidak berbisnis dengan rakyatnya. Jadi kalau rakyat yang harus ketumpuan untuk 'mensubsidi' Pertamina, baik di saat harga BBM anjlok ataupun naik, agar Pertamina tidak rugi. Ini adalah logika yang terbalik," imbuh Mulyanto.

Selain itu, menurut mulyanto, tidak tepat kalau dikatakan bahwa permintaan masyarakat terhadap Premium menurun dan mereka beralih ke Pertalite.

"Yang terjadi adalah suplai Premium yg ditahan-tahan, sehingga menjadi langka. Itu yg dilaporkan masyarakat baik di pulau Jawa maupun di luar jawa.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Dr. H. MULYANTO, M.Eng
Anggota Komisi VII DPR RI

"Selama ini Pemerintah terlalu berpihak pada Pertamina dalam hal kenaikan harga jual BBM. Dulu ketika harga BBM anjlok di awal Pandemi Covid-19, Pemerintah menyetujui Pertamina tidak menurunkan harga jual BBM. Alasannya agar kerugian Pertamina tidak terlalu dalam, sehingga BUMN ini tetap dapat menjalankan penugasan Pemerintah di sisi hulu migas,"

You Stay At Home,
We Stay At Parliament
DPR - RI
PKS

Politisi PKS Dorong Kementerian Sosial Entaskan Masalah Stunting di Indonesia

KUTIPAN

Jakarta (26/10) --- Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf mengatakan persoalan stunting di Indonesia adalah masalah sosial-kesehatan yang tidak boleh diabaikan kendati pemerintah saat ini tengah fokus menangani persoalan kesehatan akibat virus Covid-19.

Demikian hal ini disampaikan Bukhori dalam agenda Penyuluhan Sosial Prioritas bersama Kementerian Sosial di Semarang dan Kendal, Minggu (24/10/2021).

Bukhori mengatakan persoalan stunting akan menjadi bom waktu bagi generasi mendatang apabila tidak ditangani secara serius oleh pemerintah. Pasalnya, politisi PKS ini menilai persoalan stunting memiliki dampak multidimensional di masa depan.

"Penelitian di berbagai negara mengemukakan, selain menghambat perkembangan otak, balita stunting menjadi rentan terhadap penyakit sehingga berdampak pada tingginya biaya kesehatan yang perlu dikeluarkan oleh negara bagi warganya. Di samping itu, seseorang yang sejak kecil mengalami stunting juga memiliki risiko terhadap menurunnya tingkat produktivitas mereka," jelas Bukhori.

Pada akhirnya, lanjutnya, stunting akan menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan, dan memperlebar jurang ketimpangan. Bahkan Bank Dunia (World Bank) mencatat kenaikan stunting 1 persen secara nasional berkorelasi dengan penurunan produktivitas ekonomi sebesar 1,4 persen di negara berkembang di Asia dan Afrika.

Anggota Komisi Perlindungan Anak DPR ini membeberkan, melansir hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan RI pada 2018, prevalensi stunting di Indonesia mencapai 30,8 persen. Dengan kata lain 1 dari 3 balita di Indonesia mengalami stunting atau gagal tumbuh akibat kurang asupan gizi.

Meskipun angka tersebut turun menjadi 27,7 persen pada 2019, angka itu terbilang masih jauh dari angka prevalensi stunting yang menjadi rekomendasi Badan Kesehatan Dunia (WHO), yakni di bawah 20 persen.

"Kegagalan anak untuk tumbuh secara sehat berpengaruh pada kemampuan kognitifnya. Apalagi, kecerdasan kognitif merupakan modal penting untuk membangun manusia Indonesia yang memiliki daya saing global," ucapnya.

"Maka, demi memastikan anak-anak Indonesia kita bisa tumbuh optimal dan memiliki kualitas di masa mendatang, intervensi pemerintah dengan menghadirkan program yang berorientasi pada peningkatan taraf hidup keluarga menjadi keharusan demi mencegah risiko stunting pada anak," ucapnya.

Legislator dapil Jawa Tengah 1 ini juga memuji sejumlah program Kementerian Sosial yang memiliki _concern_ terhadap pengentasan stunting di Indonesia. Dirinya menuturkan, Kementerian Sosial turut mengemban tanggung jawab besar dalam merespons masalah sosial kesehatan ini.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

KH. BUKHORI, Lc., M.A.
Anggota Komisi VIII DPR RI

"Penelitian di berbagai negara mengemukakan, selain menghambat perkembangan otak, balita stunting menjadi rentan terhadap penyakit sehingga berdampak pada tingginya biaya kesehatan yang perlu dikeluarkan oleh negara bagi warganya.

HNW: Kemenag Tak untuk Diklaim atau Dibubarkan, Tapi Direalisasikan bagi Semua Umat Beragama di Indonesia

KUTIPAN

Jakarta (26/10) --- Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, prihatin dengan wacana mengklaim atau malah membubarkan Kementerian Agama, akibat dari pernyataan yang katanya internal, tapi menyebar, dari Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Pria yang akrab disapa HNW ini mengingatkan agar para Pejabat dan Umat termasuk kalangan Santri mengkaji lebih dalam sejarah dan peran serta Para Ulama Pejuang dan Bapak-bapak Bangsa, termasuk yang terkait dengan latar belakang diadakannya Departemen Agama, yang kemudian menjadi Kementerian Agama.

"Fakta sejarahnya Kementerian Agama (Kemenag) diperjuangkan oleh Tokoh-Tokoh Bangsa dari beragam latar belakang, untuk mengurusi Agama secara spesifik, dan untuk menjadi milik bangsa Indonesia secara umum, dan merupakan konsekuensi logis dari kesepakatan para Pendiri Bangsa bahwa finalnya Pancasila adalah dengan menerima kompromi sila pertama Pancasila menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa," jelas HNW mengkritisi pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas beserta klarifikasinya dan polemik yang berkembang, terkait pernyataannya yang kontroversial bahwa keberadaan Kemenag adalah hadiah khusus untuk Nahdlatul Ulama (NU), bukan untuk umumnya Umat Islam, sebagai konsekuensi dari penghapusan tujuh kata dalam piagam Jakarta melalui juru damai dari NU yang menurut Menag adalah KH Wahab Hasbullah.

HNW sapaan akrabnya mengatakan bahwa pernyataan Menag tersebut sekalipun katanya dilakukan dalam forum internal (tapi dipublikasikan) tidak sejalan dengan spirit inklusifitas dan moderasi Islam yang selalu disuarakan oleh Menag.

"Apalagi dengan pernyataan bahwa dirinya bukan Menteri Agama Islam, tapi Menteri untuk semua Agama. Karena klarifikasi dari pernyataan tersebut tidak cukup memadai untuk mengkoreksi dampak potensi terjadinya ekslusifitas yang bisa mengarah kepada laku yang tidak moderat, dan berpotensi memecah belah Ormas-Ormas Islam di Indonesia yang tokoh-tokohnya dahulu juga terlibat dalam persidangan BPUPK dan PPKI terkait piagam Jakarta, juga persidangan di BK KNIP sehingga usulan KH Soleh Suaidy(allrsyad / Masyumi), KH Abu Dardiri (Muhammadiyah/ Masyumi) dari KNI Banyumas didukung olh M Natsir (Persis/Masyumi), Dr Mawardi, M Karto Soedarmono (KNIP), bisa mengalahkan argumentasi para penolak adanya Kementerian yang khusus mengurusi Agama seperti J Latuharhari, Ki Hajar Dewantara dan lain-lain," urai HNW.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A
Anggota Komisi VIII DPR RI

"Jadi yang paling utama adalah merelasasikan tujuan dihadirkannya Depag, bukan klaim hadiah khusus untuk Ormas tertentu yang memantik tuntutan agar bila demikian, Kemenag dibubarkan saja. Kenegarawanan para Bapak Bangsa dan Menteri-Menteri Agama pada zaman perjuangan itulah yang menghadirkan sikap negarawan inklusif, toleran, moderat dan berukhuwah. "

Nur Azizah: Hindari Pendangkalan Aqidah, Kemenag Harus Jadi Sokoguru Agama Seluruh Rakyat Indonesia

KUTIPAN

Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A., M.A. dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) di Gedung Nusantara 2 DPR/MPR RI Senayan, Jakarta, menyebutkan, hingga saat ini banyak informasi di media terkait pelanggaran-pelanggaran di masyarakat menyangkut kebebasan beragama dan berkeyakinan

Menurutnya, hal itu dapat di antisipasi melalui peran optimal Kemenag, melalui Bimas-Bimas keagamaan yang dijalankan dengan baik. Kemenag sudah seharusnya menjadi sokoguru dalam beragama bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Ini tentu sangat menggelisahkan, yang saya khawatir masalah pelanggaran ini berimbas pada pendangkalan akidah. Dan ini kewajiban Kemenag untuk mengantisipasi problema semacam ini", kata Nur Azizah. Ia menambahkan, kaitan dengan hal ini, termasuk agenda dalam Bimas-Bimas Keagamaan dan kegiatan penyuluhan keagamaan harus dapat dilaksanakan secara serius. Sehingga jangan sampai terjadi pendangkalan akidah.

"Dalam Islam sendiri, kalau akidah dangkal, kemudian murtad, Naudzubillah, hal itu perlu di antisipasi, jangan sampai generasi saat ini labil, karena tidak punya fondasi akidah yang kuat dalam beragama", imbuhnya. Dengan memperkuat fungsi bimas-bimas keagamaan dan penyuluh agama Kemenag, diharapkan dapat mengatarkan rakyat Indonesia selamat dan bahagian dunia akhirat. Serta terjaga akhlak dan perilakunya dalam bermasyarakat dan bernegara.

Pada kesempatan ini, Nur Azizah turut menjelaskan, penyuluh agama dibawah KUA yang saat ini menjadi point penting Kemenag untuk dilakukan revitalisasi. Dengan adanya perbaikan infrastruktur, perluasan cakupan layanan KUA, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM KUA. Ini harus senantiasa mendapatkan pemantauan dan juga bimbingan dari bimas Islam tentunya, supaya dapat mengantarkan semua rakyat Indonesia memiliki akidah yang kokoh.

"Selain itu, patut disyukuri, kita di Indonesia juga sudah ada nilai-nilai Pancasila. Dalam sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa itu jelas, khususnya bagi umat muslim di Indonesia itu harus menjalankan perintah dan larangan Allah SWT sebagai bangsa yang religius", jelas Nur Azizah.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A.,M.A.
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VI

"Penyuluh agama dibawah KUA yang saat ini menjadi point penting Kemenag untuk dilakukan revitalisasi. Dengan adanya perbaikan infrastruktur, perluasan cakupan layanan KUA, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM KUA. Ini harus senantiasa mendapatkan pemantauan dan juga bimbingan dari bimas Islam tentunya, supaya dapat mengantarkan semua rakyat Indonesia memiliki akidah yang kokoh"

PCR Sebagai Syarat Perjalanan, Legislator PKS: Memberatkan Rakyat!

KUTIPAN

Mufida menyebut tes PCR sebagai syarat perjalanan juga memiliki beberapa catatan. Tidak semua daerah memiliki infrastruktur yang cepat dalam memproses hasil PCR. Padahal, papar dia, kebutuhan dalam perjalanan adalah kecepatan dalam proses.

Jakarta (29/10) --- Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati menyebutkan tes PCR sebagai syarat perjalanan adalah kebijakan yang menyulitkan rakyat.

Mufida meminta, pemerintah mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang baru mulai merangkak bangkit usai berbagai pembatasan sosial untuk menekan penyebaran Covid-19.

"Meskipun diturunkan harganya, kebijakan tes PCR sebagai syarat perjalanan menyulitkan dan memberatkan rakyat. PKS concern dalam masalah keluarga, adanya beban tes PCR sebagai syarat perjalanan pasti menambah beban biaya belanja keluarga," papar Mufida dalam keterangannya, Jumat (29/10).

Ia menyebut tes PCR sebagai syarat perjalanan juga memiliki beberapa catatan. Tidak semua daerah memiliki infrastruktur yang cepat dalam memproses hasil PCR. Padahal, papar dia, kebutuhan dalam perjalanan adalah kecepatan dalam proses.

"PCR memerlukan waktu lebih lama untuk mengetahui hasilnya. Padahal sampling droplet yang dites berlaku pada saat di tes. Sehingga saat bepergian setelah dua hari berikutnya misalnya, apakah hasil tesnya masih akurat?" tanyanya.

Penambahan beban ini, ungkap Mufida, akan berdampak bagi mereka yang bepergian lebih dari tiga hari. Sebab saat ini hasil tes PCR berlaku selama tiga hari.

"Berapapun harganya meski sudah diturunkan Rp 275 ribu, jika perginya lebih dari tiga hari, maka harus dua kali PCR untuk pulang pergi, sehingga semakin menambah beban masyarakat," terang Mufida.

Mufida menekankan agar agresivitas vaksinasi lebih dilakukan. Vaksinasi dilakukan guna meminimalisir dampak berat dari penularan Covid-19.

"Vaksin sudah dijadikan sebagai syarat dalam mengakses fasilitas publik. Kini ditambah syarat PCR untuk perjalanan. Kebijakan ini harus ditinjau ulang," ujar Mufida.

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.
Anggota Komisi IX DPR RI

"Meskipun diturunkan harganya, kebijakan tes PCR sebagai syarat perjalanan menyulit-kan dan memberatkan rakyat. PKS concern dalam masalah keluarga, adanya beban tes PCR sebagai syarat perjalanan pasti menambah beban biaya belanja keluarga,"

Aleg PKS: Pemerintah Harus Beri Perhatian Khusus Bagi Pasien Long Covid-19

KUTIPAN

Berdasarkan data per Senin (18/10), kasus sembuh Covid-19 Indonesia sudah mencapai 4.075.011 kasus. “Jika kita memakai ukuran penelitian tersebut, maka akan ada sekitar dua juta orang yang mengalami long Covid-19 di Indonesia. Hal ini membutuhkan penanganan lanjutan,” kata Netty

Jakarta (20/10) --- Covid-19 sudah menginfeksi lebih dari 4 juta penduduk Indonesia. Meskipun telah dinyatakan sembuh, sebagian penyintas Covid-19 kerap memiliki keluhan lanjutan yang disebut sebagai long Covid-19.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani meminta Pemerintah agar memberikan perhatian khusus pada penyintas yang menga-lami gejala long Covid-19.

“Kondisi long Covid-19 ini harus ada perhatian khusus, tidak boleh dianggap sepele. Apalagi ada penelitian di Ame-rika yang menunjukkan bahwa setengah dari jumlah pasien yang sembuh mengalami long Covid-19,” kata Netty dalam keterangan medianya, Selasa (19/10/2021).

Berdasarkan data per Senin (18/10), kasus sembuh Covid-19 Indonesia sudah mencapai 4.075.011 kasus.

“Jika kita memakai ukuran penelitian tersebut, maka akan ada sekitar dua juta orang yang mengalami long Covid-19 di Indonesia. Hal ini membutuhkan penanganan lanjutan,” kata Netty.

Menurut Netty, gejala long Covid-19 yang dijelaskan WHO antara lain, kelelahan, sesak napas, nyeri perut, penglihatan kabur, nyeri dada, batuk dan lain-lain.

“Pemerintah harus memasukkan pasien dengan gejala long Covid-19 sebagai pasien dengan tindakan khusus yang mendapat jaminan pembiayaan. Pemerintah tidak boleh lepas tangan begitu saja. Perawatan pasien Covid-19 dan long Covid-19 harus jadi satu paket yang pengobatannya ditanggung oleh negara,“ ungkapnya.

“Perlu disiapkan unit khusus perawatan pasien long Covid-19 di seluruh faskes yang menangani Covid-19. Dengan demikian, para penyintas tidak perlu bingung harus berobat kemana jika mengalami gejala lanjutan pasca dinyatakan sembuh,” tambahnya.

Untuk tahap awal, kata Netty, pemerintah dapat menyiapkan pilot project-nya di beberapa titik untuk kemudian

Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si
Anggota Komisi IX DPR RI

“Pemerintah harus memasukkan pasien dengan gejala long Covid-19 sebagai pasien dengan tindakan khusus yang mendapat jaminan pembiayaan. Pemerintah tidak boleh lepas tangan begitu saja. Perawatan pasien Covid-19 dan long Covid-19 harus jadi satu paket yang pengobatannya ditanggung oleh negara,“

Presiden Jokowi Minta Harga PCR 300 Ribu, Aleg PKS: Sudah Untung Besar, Bisa Murah Lagi

KUTIPAN

Jakarta (26/10) --- Anggota Komisi IX DPR RI, dari Fraksi PKS, Alifudin menduga para pengusaha Lab tes PCR sudah meraup untung besar, sejak Pandemi Covid 19 ada di Indonesia, maka baiknya harga tes PCR bisa lebih murah lagi.

Hal itu berkaitan dengan permintaan presiden mengenai turunnya harga Tes PCR menjadi 300 ribu dan jangka waktu PCR menjadi 3 x 24 jam.

"Sejak awal sudah untung besar, karena pandemi covid 19 ini tentang kemanusiaan, baiknya semua yang ingin PCR bisa mendapat harga lebih murah lagi, atau kalau bisa gratis" Ujar Alifudin saat dimintai keterangan, Selasa (26/10).

Sebelumnya, harga tes Swab PCR saat pademi Covid 19 di Indonesia yaitu dari harga batas 900 ribu, lalu harga 450 ribu, sampai sekarang permintaan pemerintah ke harga batas 300 ribu.

"Harga 300 ribu ini sama seperti usulan Gubernur Kalbar dan Kemenkes di bulan Agustus lalu, seharusnya Presiden bisa lebih murah lagi, misal menurunkan harga PCR menjadi 75 ribu seperti Antigen" tambah Alifudin

Alifudin juga meminta ketegasan kepada Pemerintah, jika ada lab atau pengusaha PCR yang mematok harga mahal harus diberi sanksi tegas, dan juga jangka waktu keluarnya hasil harus disamakan tidak ada yang kelas ekonomi, ekspres atau yang lain.

"Kami berharap, setelah reses akan meminta pimpinan komisi IX untuk memanggil pihak terkait, bahwa Pandemi Covid 19 ini tidak dijadikan ladang bisnis pihak tertentu" Tegas Alifudin.

Anggota Komisi IX ini juga meminta kepada pemerintah serius dalam mengkaji persoalan PCR ini, untuk benar-benar membuktikan Pemerintah berpihak pada rakyat dan serius dalam menangani pandemi Covid 19 ini.

Sebelumnya Pemerintah baru-baru ini mengeluarkan kebijakan mewajibkan tes PCR sebagai syarat perjalanan pesawat.

"Arahan Presiden harga PCR dapat diturunkan menjadi Rp 300 ribu dan berlaku selama 3x24 jam untuk perjalanan pesawat," ujar Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers Evaluasi PPKM, pada Senin (25/10/2021).

H. ALIFUDIN, S.E.,M.M
Anggota Komisi IX DPR RI

"Sejak awal sudah untung besar, karena pandemi covid 19 ini tentang kemanusiaan, baiknya semua yang ingin PCR bisa mendapat harga lebih murah lagi, atau kalau bisa gratis"

PKS
#Tetap
Jaga
Prokes
Indonesia
Mulai Membaik
Terima Kasih
#Nakes Pahlawan
Bangsa
fraksi.pks.id
FPKS DPR RI
fraksipksdprri
@FPKSDPRRI
PKS TV DPR RI
Image : BBC

Fikri Faqih Dorong PTM Dan BDR, Ciptakan Belajar Yang Kondusif

KUTIPAN

Brebes (28/10) --- Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dr. Abdul Fikri Faqih, MM mendorong Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas dan juga Belajar Dari Rumah (BDR). Hal itu disampaikannya usai menjadi keynote speaker di acara Workshop Pendidikan di Grand Dian Hotel Brebes, Sabtu (16/10/2021).

Acara yang mengusung tema "Persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas Dalam Rangka Menciptakan Lingkungan Belajar Kondusif Di Sekolah" terselenggara atas kerjasama Ditjen PAUD Didkdasmen Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) bersama Komisi X DPR RI dan dihadiri Direktur Pendidikan Anak Usia Dini yang di wakili Direktur SMA Kemendikbudristek Suhartono Farhan dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes Sutrisno diikuti ratusan guru, Kepala sekolah dan penyelenggara pendidikan se-Kabupaten Brebes.

Fikri Faqih mengatakan pelaksanaan PTM terbatas tidah boleh lengah di situasi pandemi Covid-19, maka kami mendorong PTM terbatas juga BDR," ujar Politisi PKS dari Dapil 9 Jawa Tengah (Kabupaten Tegal, Kota Tegal dan Brebes) ini.

Faktanya, Fikri menjelaskan di Jawa Tengah di beberapa tempat terjadi cluster baru, ini karena faktor kelengahan, makanya meski tidak menjadi syarat mutlak tetapi ini kebutuhan bahwa tenaga pendidik harus telah tervaksin maksimal dengan tetap terapkan protokol kesehatan (prokes). Maka, yang menjadi perhatiannya adalah tenaga pendidik.

Fikri menilai jika Brebes menjadi sangat penting mengingat Kabupaten Brebes memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sangat rendah. Dengan situasi pandemi Covid-19 diharapkan bisa menjadi spirit bangkit mengejar ketinggalannya dan Alhamdulillah Brebes salah satu daerah yang sudah level 3 sehingga di perbolehkan PTM terbatas.

Lanjut Fikri, Pembelajaran anak usia dini pada PAUD di masa pandemi Covid-19 sangat susah untuk mengelola cara belajarnya. Jadi kalau PTM ini terjadi dan semua guru PAUD sudah di vaksin, pembelajaran bisa berjalan.

Karena menurut Fikri, anak usia dini ini tidak terlalu rentan untuk terpapar Covid-19. Jadi yang perlu diperhatikan adalah guru dan tenaga pendidiknya, karena usia dewasa lebih rentan terpapar Covid-19,

"Selain itu, para guru dan tenaga pendidikan juga harus menjaga protokol kesehatan dengan ketat," pungkasnya.

Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM
Wakil Ketua Komisi X DPR RI

"Pembelajaran anak usia dini pada PAUD di masa pandemi Covid-19 sangat susah untuk mengelola cara belajarnya. Jadi kalau PTM ini terjadi dan semua guru PAUD sudah di vaksin, pembelajaran bisa berjalan. Karena anak usia dini ini tidak terlalu rentan untuk terpapar Covid-19. Jadi yang perlu diperhatikan adalah guru dan tenaga pendidiknya, karena usia dewasa lebih rentan terpapar Covid-19,"

Imbas Bendera Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Aleg PKS Akan Evaluasi Kinerja LADI

KUTIPAN

Jakarta (20/10) --- Anggota Komisi X DPR RI Mustafa Kamal mengkritik keras kinerja Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) karena gagal memenuhi ketentuan dalam 'test doping plan' (TDP) yang diminta World Anti-Doping Agency (WADA) sehingga berimbas pada hukuman pelarangan pengibaran bendera merah putih di penyerahan trofi Thomas Cup 2020..

"Seharusnya sebagai salah satu lembaga negara, LADI harus lebih responsif menanggapi surat WADA yang meminta klarifikasi atau bantahan. Sampaikan bahwa pemenuhan ketentuan 700 sampel baru bisa dipenuhi pada pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX pada Oktober 2021. Sehingga, WADA mungkin akan memberikan dispensasi," kata Mustafa pada selasa (19/10/2021).

DPR akan melakukan evaluasi atas kinerja yang tidak profesional dari LADI agar kejadian yang dapat menyebabkan tercorengnya nama baik Indonesia di mata dunia tidak terulang kembali.

"Kejadian ini menjadi bukti bahwa kelembagaan anti-doping di Indonesia harus serius dibenahi. Jangan sampai momen yang mengurangi kegembiraan perayaan pencapaian prestasi akibat kelalaian lembaga Pemerintah terulang kembali," ujar Mustafa.

Lebih lanjut, Mustafa meminta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) untuk melakukan penilaian kinerja terhadap LADI yang nantinya menjadi dasar dalam substansi Rancangan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (RUU SKN) Nomor 3 tahun 2005 yang kini sedang dibahas.

"Dalam RUU ini membahas mengenai penugasan, pengawasan, kewenangan, dan tata kerja organisasi lembaga anti doping. Sehingga evaluasi dari Menpora bisa menjadi masukan dalam pendalaman terkait regulasi yang mengatur LADI," jelas Anggota Fraksi PKS ini.

Sebelumnya, WADA telah meminta kepada Indonesia dalam surat resminya pada 15 September 2021 untuk segera memberi bantahan atau klarifikasi. Tenggat waktu yang diberikan adalah 21 hari sejak surat pertama dilayangkan.

Namun hingga batas waktu yang ditentukan kedaluwarsa Indonesia tidak memberi balasan. Karenanya WADA melayangkan surat ancaman sanksi untuk memberikan penjelasan terperinci.

Menpora dan LADI dalam Konferensi Pers pada Senin (18/10/2021), beralasan pergantian pengurus LADI dan terhentinya kompetisi akibat pandemi menjadi penghambat terpenuhinya target sampel doping dan menjadikan Indonesia tidak bisa memenuhi TDP tahun 2020 dan 2021. Sedangkan PON XX Papua yang menjadi salah satu bagian dari sampel tes doping baru bergulir awal Oktober 2021.

H. MUSTAFA KAMAL, S.S.
Anggota Komisi X DPR RI

"Kejadian ini menjadi bukti bahwa kelembagaan anti-doping di Indonesia harus serius dibenahi. Jangan sampai momen yang mengurangi kegembiraan perayaan pencapaian prestasi akibat kelalaian lembaga Pemerintah terulang kembali"

Anggota DPR RI Ini Punya Solusi Atasi Krisis Energi dan Disrupsi Teknologi

KUTIPAN

Jakarta (29/10) --- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyatakan, perubahan iklim hingga menimbulkan krisis energi tentu bisa berdampak bagi kondisi makro ekonomi.

Hal ini dapat ditinjau tidak hanya dari sisi permintaan, tetapi juga penawaran bisa menjadi pemicu dampak secara keseluruhan.

"Kondisi naiknya suhu, perubahan cuaca ekstrim, tekanan udara bisa berkaitan dengan penurunan produktivitas ekonomi. Secara langsung akan mempengaruhi pertanian, perkebunan, kehutanan, industri, pariwisata, dan sebagainya," ujar Anggota Komisi XI Anis Byarwati melalui pesan singkat kepada Tribunnews, Kamis (28/10/2021).

Kendati demikian, menurutnya dampak krisis energi tentu saja sangat tergantung dengan kemampuan masing-masing negara untuk beradaptasi dalam menghadapi perubahan iklim.

Perbedaan iklim di setiap negara seharusnya akan menentukan besarnya dampak terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dia menilai negara seharusnya sudah siap dengan melakukan antisipasi karena kerentanan terhadap perubahan iklim tersebut.

"Untuk itu, tanggapan kebijakan lebih kuat terhadap ancaman perubahan iklim, termasuk upaya mitigasi dan adaptasi harus disiapkan secara matang.

Dengan demikian, tidak ada efek semakin bertambah parah jika ditambah dengan masalah simultan yakni kesehatan dan menurunnya kualitas gizi akibat perubahan iklim," kata Anis.

Selanjutnya, jika bicara teknologi digital, maka sudah bukan lagi perkara masa depan, tapi sudah menjadi realita bagi dunia secara keseluruhan.

Namun, terus meningkatnya perkembangan teknologi hingga menimbulkan disrupsi sebenarnya demi mengimbangi kebutuhan manusia.

Sebab di setiap aspek kehidupan akan selalu ada teknologi digital untuk membantu kita sehari-hari, menjadikan aktivitas lebih efisien.

Bahkan dalam kondisi sekarang ini, sektor komunikasi menjadi bukti nyata bahwa pandemi mendorong masyarakat Indonesia untuk segera melakukan transisi dari manual ke era digital.

"Justru kita harus bisa meningkatkan perekonomian dengan memanfaatkan teknologi digital. Pandemi ini mau tidak mau merupakan satu faktor, dimana memicu pergeseran aktivitas dari offline menuju online karena keterbatasan ruang gerak selama pandemi," pungkas Anis.

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si
Anggota Komisi XI DPR RI

“Negara seharusnya sudah siap dengan melakukan antisipasi karena kerentanan terhadap perubahan iklim tersebut. Untuk itu, tanggapan kebijakan lebih kuat terhadap ancaman perubahan iklim, termasuk upaya mitigasi dan adaptasi harus disiapkan secara matang. Dengan demikian, tidak ada efek semakin bertambah parah jika ditambah dengan masalah simultan yakni kesehatan dan menurunnya kualitas gizi akibat perubahan iklim”

Mari Tetap
Patuhi Protokol
Kesehatan
Fraksi PKS DPR RI
fraksipksdprri
@fpksdprri
fraksi.pks.id

Kembalikan Fokus untuk Kesehatan Ibu dan Anak

OLEH

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.
Anggota Komisi IX DPR-RI Fraksi PKS

Tahun 2020 dan 2021 adalah tantangan besar bagi kesehatan nasional. Munculnya pandemi Covid-19 berdampak langsung kepada sistem kesehatan. Bukan hanya pada penanggulangan bahaya Covid-19, persoalan kesehatan di sektor lain juga terimbas.

Subjek yang paling mendapatkan imbas dengan ekses berlapis adalah ibu dan anak. Ibu dan anak adalah komponen prioritas dalam kebijakan kesehatan. Baiknya kesehatan ibu dan anak menjadi parameter baiknya sistem kesehatan sebuah bangsa.

Selama pandemi Covid-19, ibu dan anak menjadi korban langsung dari keganasan virus Covid-19. Pada Juli 2021 misalnya, Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) mencatat sebanyak 536 ibu hamil dinyatakan positif Covid-19 selama setahun terakhir. Dari jumlah tersebut, tiga persen diantaranya dinyatakan meninggal dunia.

Sampai 11 November 2021 data dari covid-19.go.id, 51,3 persen dari total 4,249,759 yang terpapar covid adalah perempuan dan 47,7 persen dari 143,608 yang meninggal karena covid adalah perempuan. Dengan proporsi 74,9 persen yang terpapar covid berada pada rentang usia 19-59 tahun, maka ibu menjadi kelompok yang terbanyak terpapar covid-19.

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyebut kasus Covid-19 pada anak di Indonesia dalam rentang Desember 2020 hingga Maret 2021 adalah tertinggi di Asia. Jumlahnya diperkirakan sebanyak 260 ribu.

Ibu dan anak bukan hanya mendapat satu 'pukulan' karena kasus Covid-19. Jumlah yatim karena orang tua meninggal (baik ibu, ayah atau keduanya) juga meningkat tajam. Kementerian Sosial RI memperkirakan ada 30 ribu anak yatim karena Covid-19 per September 2021. Jumlah ini amat terbuka bertambah.

Kelompok paling rentan

Dampak langsung maupun tak langsung pandemi terhadap ibu dan anak menegaskan jika kelompok ini adalah yang paling rentan dalam sistem kesehatan.

Pekerjaan rumah dalam persoalan kesehatan ibu dan

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Kembalikan Fokus untuk ... (Tamat)

anak masih menjadi indikator utama dalam perbaikan sistem kesehatan nasional. Angka Kematian Ibu (AKI) dan angka stunting masih jadi tanggungan persoalan yang tak kunjung sesuai harapan.

Memastikan kesehatan ibu dan anak seharusnya menjadi kebijakan yang prioritas. Target-target kesehatan ibu dan anak secara global baik dalam parameter Sustainable Development Goals (SDGs) maupun target di PBB juga menjadi target pemerintahan secara nasional.

Pada tahun 2030, kita memiliki target Angka Kematian Ibu berkurang menjadi 70 per 100.000 kelahiran hidup. Akan tetapi tercatat ada 305 ibu meninggal per 100 ribu orang menurut data Kementerian Kesehatan 2015.

Di negara serumpun Asia Tenggara, AKI di Indonesia tergolong tertinggi. WHO pada 2014 pernah melaporkan AKI Indonesia 214 per 100 ribu kelahiran hidup, sementara Malaysia 39 per 100 ribu, Thailand 44 per 100 ribu, Brunei 60 per 100 ribu dan Filipina 170 per 100 ribu.

Target stunting pada 2024 adalah 14 persen. Sementara Kemenkes melansir, capaian prevalensi balita stunting di Indonesia tahun 2019 mencapai 27,7 persen. Menurut WHO, masalah kesehatan masyarakat dapat dianggap kronis bila prevalensi stunting lebih dari 20 persen.

Kembali fokus ke ibu dan anak

Adanya gap besar antara target dan capaian dalam dua indikator kesehatan ibu dan anak harus jadi perhatian serius. Belum lagi kita bicara soal penyebab kematian ibu dan perempuan seperti kanker payudara dan kanker serviks.

Pandemi Covid-19 memang berdampak terhadap capaian target peningkatan kesehatan ibu dan anak. Bersyukur situasi mulai menunjukkan penurunan kasus setelah gelombang kedua pada Juli-September 2021.

Tetap dengan diiringi kewaspadaaan dan mitigasi gelombang ketiga, fokus dan perhatian kebijakan harus mulai dilakukan terhadap kelompok ibu dan anak. Dua tahun berjalannya pandemi seharusnya lebih dari cukup untuk melakukan adaptasi.

Kebijakan-kebijakan bisa disusun lebih adaptif dan agile. Masyarakat sebenarnya tetap tinggi antusiasme untuk menjaga kesehatan ibu dan anak.

Contoh kasus pada imunisasi. Layanan imunisasi sempat terhenti terutama di Posyandu dan Puskesmas. Hal ini tentu berdampak pada kesehatan anak yang 'sedikit' terabaikan.

Tapi data survei dari Unicef dan Kementerian Kesehatan 2020 tentang imunisasi pada masa pandemi menunjukkan 51 persen responden tetap mendatangi pos pelayanan imunisasi selama pandemi. Sementara sisanya memilih tidak datang ke pos pelayanan imunisasi karena kondisi.

Minatnya tetap tinggi, tapi perilakunya yang berubah. Masih dalam survei yang sama, sebelum pandemi 90 persen anak diimunisasi di fasilitas umum. Sementara selama pandemi, survei menunjukkan klinik dan rumah sakit swasta jadi sumber utama mendapatkan layanan imunisasi.

Kebijakan yang adaptif ini perlu jadi semangat dalam pelaksanaan program. Jika pemerintah terlihat 'ngotot' ingin fleksibel dalam pengaturan keuangan negara dengan memaksakan Perpu No 1 Tahun 2021, maka seharusnya kebijakan di lapangan juga bisa dibuat jauh lebih fleksibel. Toh pemerintah amat suka mengubah-ubah kebijakan tanpa sebuah pertimbangan yang matang.

Momentum Hari Kesehatan Nasional 2021 ini harus dimaknai bangkitnya kembali sistem kesehatan nasional secara menyeluruh dengan tidak mengabaikan kewaspadaan terhadap dampak nyata Covid-19. Terutama kembali menjadikan ibu dan anak prioritas dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Kebijakan-kebijakan bisa disusun lebih adaptif dan agile. Masyarakat sebenarnya tetap tinggi antusiasme untuk menjaga kesehatan ibu dan anak.

KUTIPAN

> Memastikan kesehatan ibu dan anak seharusnya menjadi kebijakan yang prioritas. Target-target kesehatan ibu dan anak secara global baik dalam parameter Sustainable Development Goals (SDGs) maupun target di PBB juga menjadi target pemerintahan secara nasional.

JEBAKAN PINJOL ILEGAL

PKS mendesak pemerintah untuk tegas menyelesaikan masalah pinjaman online (pinjol) dari hulunya

- Bunga yang begitu tinggi
- Diteror debt collector
- Mengakhiri hidup karena terlilit utang

- Maraknya kasus pinjaman online **(pinjol) ilegal menimbulkan keresahan** di tengah masyarakat.

- **19.711** aduan sejak 2019 s.d Oktober 2021

- Sejak 2018, OJK blokir **3.516** aplikasi/website pinjol ilegal

- Fenomena pinjol ilegal ini muncul dan mengeksploitasi kebutuhan masyarakat yang **membutuhkan pinjaman dana dalam waktu cepat.**

Penagihan tidak beretika Pinjol Ilegal

- Pencairan dana tanpa persetujuan
- Ancaman penyebaran data pribadi
- Melakukan teror dan intimidasi kepada seluruh kontak peminjam
- Menggunakan kata kasar dan pelecehan seksual

PKS TV DPR RI | FPKS DPR RI | fraksipksdprri | @fpksdprri | @fpksdprri | **INFOGRAFIS** : Aditya A | **SUMBER : Rilis** fraksi.pks.id

Reses di Kabupaten Bekasi, Syaikhu Berikan Bantuan untuk Tim Rescue Relawan PKS

KUTIPAN

Presiden PKS memberikan apresiasi kepada DPD PKS Kabupaten Bekasi yang telah melaksanakan Pelatihan Tim Rescue. Kegiatan ini sebagai langkah antisipasi menghadapi musim hujan yang berpotensi menimbulkan banjir.

Kabupaten Bekasi (21/10) --- Anggota DPR RI Ahmad Syaikhu memberikan bantuan kepada Tim Rescue DPD PKS Kabupaten Bekasi, Senin (19/10) di Tambun Selatan. Kegiatan ini dilakukan Syaikhu saat reses sebagai Wakil Rakyat.

Menurut Syaikhu, bantuan ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan semangat dalam membantu masyarakat.

"Ini bantuan tidak seberapa. Mudah-mudahan dapat lebih membuat semangat teman-teman Tim Rescue," kata Syaikhu.

Selama ini, tambah Syaikhu, Tim Rescue telah banyak melakukan aktivitas pelayanan berupa pertolongan kepada masyarakat saat bencana alam terjadi. Seperti banjir, tanah longsor hingga gempa bumi.

"Tim Rescue ini sudah banyak berbuat untuk masyarakat yang terkena bencana alam," ujar Syaikhu.

Presiden PKS itu juga memberikan apresiasi kepada DPD PKS Kabupaten Bekasi yang telah melaksanakan Pelatihan Tim Rescue. Kegiatan ini sebagai langkah antisipasi menghadapi musim hujan yang berpotensi menimbulkan banjir

"Saya apresiasi diadakannya agenda pelatihan ini. Sebab sebentar lagi musim hujan akan hadir," katanya.

Syaikhu berharap aktivitas program semacam ini terus dilanjutkan. Sebab membantu masyarakat yang dilanda musibah sudah menjadi DNA PKS.

"Lanjutkan program ini. Karena DNA PKS adalah melayani dan membantu masyarakat yang terkena musibah," jelas Syaikhu lagi.

Salah seorang Relawan, Junaedi Abdillah mengucapkan terimakasih atas bantuan dari Syaikhu.

"Terimakasih Pak Syaikhu. Bantuan seperti ini kami butuhkan untuk aktivitas di lokasi bencana," ujarnya.

Hadir dalam acara ini Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi Budi MM, Sekretaris Uryan Riana, Tenaga Ahli DPR RI Dr. Wibowo, Budiwanto dan Erwyn Kurniawan.

H. AHMAD SYAIKHU
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VII

“Bantuan ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan semangat dalam membantu masyarakat. Ini bantuan tidak seberapa. Mudah-mudahan dapat lebih membuat semangat teman-teman Tim Rescue. Selama ini Tim Rescue telah banyak melakukan aktivitas pelayanan berupa pertolongan kepada masyarakat saat bencana alam terjadi. Seperti banjir, tanah longsor hingga gempa bumi. Tim Rescue ini sudah banyak berbuat untuk masyarakat yang terkena bencana alam”.

Saat Reses, Fikri Dorong Event Budaya dan Kreatif di Brebes Lebih Geliat

KUTIPAN

Brebes (21/10) --- Anggota DPR RI asal Dapil Jawa Tengah IX, Abdul Fikri Faqih mendorong geliat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Brebes usai menurunnya level pembatasan kegiatan masyarakat menjadi level 3.

"Namun tetap dalam koridor yang aman dan protokol Kesehatan, disamping itu banyak event kreatif budaya yang sesuai dengan kondisi pandemi saat ini," ucapnya saat membuka diskusi dalam Kegiatan Bimbingan Teknis kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Baparekraf RI di Hotel Grand Dian Brebes, Selasa (19/10/2021).

Fikri lebih lanjut meminta semua pihak berkolaborasi dalam mensukseskan program perbaikan ekonomi masyarakat, terutama di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, khususnya usai dihantam badai pandemi dalam dua tahun terakhir.

"Kami prihatin dengan melemahnya aktifitas ekonomi masyarakat di sektor pariwisata, seni pertunjukan, hingga kuliner di Brebes, meskipun kita tetap harus optimis melihat peluang," imbuh politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Peluang yang dimaksud adalah tumbuhnya sektor ekonomi lain, justru di kala pandemi terjadi.

"Misalnya di sektor aplikasi digital, masyarakat harus bisa memanfaatkan peluang ini untuk berkreasi jualan melalui online (daring), ataupun event kreatif yang kini ramai secara daring," jelasnya.

Namun demikian, dirinya juga mengingatkan agar tetap berhati-hati dalam membuka aktifitas wisata yang beresiko meningkatkan angka infeksi covid-19.

"Jangan sampai Ketika dibuka, langsung muncul klister-klaster baru, sehingga kita harus memulai dari awal lagi," pintanya.

Fikri memandang penting koordinasi berbagai pihak terkait dalam program wisata dan ekonomi kreatif di Brebes untuk Bersama memberi solusi bagi masyarakat, utamanya pelaku seni dan budaya.

"Dalam konteks parekraf dikenal istilah ABG-Caem, yakni Akademisi, Bisnis, government, community, media yang menjadi kunci sukses dalam setiap perhelatan event," pungkas Fikri.

Koordinator Wisata Budaya dan Buatan, Direktorat Wisata Minat Khusus Kemenparekraf/ Baparekraf RI, Arya Galih Anindita mengungkapkan, banyak komponen wisata yang sesungguhnya sangat cocok dengan kondisi pandemi.

"Karena bidang wisata minat khusus ini malah menjauhi kerumunan, contohnya wisata pedesaan, trekking, bahari, petualangan, olahraga, jelajah, ekstrem sport, dll," urainya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah IX

"Kami prihatin dengan melemahnya aktifitas ekonomi masyarakat di sektor pariwisata, seni pertunjukan, hingga kuliner di Brebes, meskipun kita tetap harus optimis melihat peluang,"

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Di Dapil saat Reses, Nevi Serahkan Ambulance dan Bantuan untuk Masjid dan Lembaga Pendidikan

KUTIPAN

Payakumbuh (23/10) --- Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nevi Zuairina menyerahkan bantuan dari PT Pelindo Persero untuk pembangunan Masjid Syuhada Boncah, Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat sebesar Rp70 juta.

Selain bantuan Masjid, Nevi juga menyerahkan bantuan dari beberapa perusahaan negara untuk masyarakat di Padang Pariaman, Kota Pariaman, Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota berupa bantuan pendidikan dan penyerahan Ambulance.

"Mudah-mudahan bantuan ini dapat membantu pembangunan Masjid Syuhada yang sesuai dengan keinginan dari masyarakat di sini," ujar Anggota DPR-RI Komisi VI itu usai menyerahkan secara simbolis bantuan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) PT Pelindo.

Ia mengatakan bahwa jika pembangun masjid ini telah selesai diharapkan bisa mendukung aktivitas Masjid ini sebagai pusat peradaban untuk melahirkan generasi penerus yang hebat dan religius.

"Generasi muda adalah calon pengganti generasi saat ini untuk memimpin negara, maka di masa depan perlu ada pemimpin yang baik dan bijaksana. Semoga pembangunan Masjid ini juga semakin memperkuat nilai-nilai religius dan kenyamanan dalam beribadah," ujarnya didampingi Riswandi Abbas.

Deputi General Manajer PT Pelindo regional II Teluk Bayur Imron Syamsi mengharapkan bantuan yang diserahkan dapat membantu dan dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam membangun Masjid harapan dari masyarakat.

"Kami mohon maaf kami dari PT Pelindo tidak bisa membantu secara penuh pembangunan dari Masjid Syuhada. Semoga ini dapat membantu penyelesaian pembangunan masjid ini," ujarnya.

Selain Masjid, pada hari yang sama PT Pelindo juga telah menyerahkan bantuan untuk salah satu PAUD di Kota Payakumbuh Rp47 juta.

Sementara itu Ketua Pengurus Masjid Syuhada Boncah Nasputra Dt Paduko Marajo mengatakan telah melakukan pembangunan masjid ini semaksimal mungkin semenjak 25 Mei namun memang belum selesai hingga saat ini.

"Kami selaku pengurus berusaha untuk menjembatani infak dan sedekah dari sekitar 220 rumah di dekat masjid. Kami berinfak dan sedekah, per-rumah diharapkan bisa membantu sekitar Rp500 ribu," katanya.

Ia mengatakan masyarakat sekitar yang berinfak tidak pernah melalui paksaan dan diberikan secara bertahap oleh masyarakat selama satu tahun.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Hj. NEVI ZUAIRINA
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat II

> "jika pembangun masjid ini telah selesai diharapkan bisa mendukung aktivitas Masjid ini sebagai pusat peradaban untuk melahirkan generasi penerus yang hebat dan religius. Generasi muda adalah calon pengganti generasi saat ini untuk memimpin negara, maka di masa depan perlu ada pemimpin yang baik dan bijaksana. Semoga pembangunan Masjid ini juga semakin memperkuat nilai-nilai religius dan kenyamanan dalam beribadah

Kunjungi Solok Selatan, Hermanto Serahkan 6 Macam Bantuan

KUTIPAN

Kabupaten Solok (21/10) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Hermanto saat berada di Dapil Sumbar I dalam kunjungan kerja di daerah pemilihan. Kunjungan ini diisi dengan menjumpai sejumlah kelompok di Kabupaten Solok Selatan guna menyerahkan 6 jenis bantuan pemerintah.

Bantuan tersebut berupa alat dan mesin pertanian (alsintan), jaringan irigasi tersier (JIT), kampung buah, jalan usaha tani (JUT), Kebun Bibit Rakyat (KBR) dan Pengembangan Perhutanan Sosial Nasional (Bang PeSoNa)

Ada 3 jenis alsintan yang diserahkan yaitu traktor roda 2, huller dan polisher. Traktor roda 2 diserahkan ke kelompok tani (Pokta Bineka Tani, Jorong Sungai Kalu I, Nagari Pakan Rabaa Utara, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh (KPGD). Huller dan polisher diserahkan ke Poktan Ranah Saiyo, Jorong Tandai Ateh, Nagari Lubuk Gadang Tenggara, Kecamatan Sangir.

JIT diserahkan ke dua kelompok yaitu Poktan Sahabat Kita, Jorong Batang Limpaung, Nagari Pakan rabaa tengah, Kecamatan KPGD dan Poktan Kato Saiyo, Jorong Janjang Kambing, Nagari Luak Kapau, Kecamatan Pauh Duo.

Bantuan Kampung Buah berupa 1000 bibit kelengkeng diserahkan kepada Poktan Sarumpun Saiyo, Jorong Batuang Bajawek, Nagari Pakan Rabaa Utara, Kec. KPGD. Jalan usaha tani diserahkan ke Poktan Teratak Bersatu, Jorong Teratak Panas, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan KPGD. Jalan tersebut memiliki panjang 377 meter dan lebar 1,5 meter.

Kebun Bibit Rakyat diserahkan kepada Kelompok Takondai, Jorong Sungai Durian, Nagari Bomas Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu. Bantuan berupa 30 ribu bibit yang jenisnya antara lain durian, pinang dan jengkol. Adapun Bang PeSoNa diserahkan ke kelompok Lembu Lestari, Jorong Bukit Malintang, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir. Bantuannya berupa 10 ekor kambing dan lebih dari 600 bibit manggis dan pinang.

Menurut Hermanto, semua bantuan tersebut didanai APBN. "Semua bantuan tersebut semoga bisa menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Solok Selatan," jelas legislator dari FPKS DPR RI ini.

Dalam rangkaian penyerahan bantuan tersebut, Hermanto didampingi tokoh muda setempat Effendi Muharram.

Dr. HERMANTO, S.E., M.M
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat I

"Semua bantuan tersebut didanai APBN. semoga bisa menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Solok Selatan,"

PKS LEGISLATIVE CORNER

MEMBAHAS ISU DARI SUDUT YANG PAS

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PKS

ERLANDA WIDYA YOANDRO

Live Interactive

Bersama Anggota Legislatif PKS

Saksikan Setiap Jum'at

pk. 13.30 s.d 14.30 WIB

fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

Harga Cabe Anjlok, Sekjend PKS Borong Dari Petani

KUTIPAN

Kabupaten Hulu Sungai Selatan (22/10) --- Rendahnya harga cabe merah di tingkat petani menjadi atensi Sekjend PKS Habib Aboe Bakar Al Habsyi. Saat reses di Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (22/10) Habib Aboe Bakar langsung memborong cabe merah yang baru dipanen oleh petani

Selain mendengarkan aspirasi para petani, Habib Aboe juga membeli cabai tersebut dengan harga tinggi, seperti yang diketahui bahwa belakang ini harga cabai sedang turun.

"Alhamdulillah cabai ini kita borong, saya mengajak rekan-rekan aleg dari PKS untuk memberikan dukungan untuk para petani kita," Kata Habib Aboe sembari mengajak Anggota Legislative dari PKS untuk membeli hasil pertanian masyarakat.

Selanjutnya cabai ini akan dibagikan kepada masyarakat sekitar untuk kebutuhan sehari-hari.

"Cabai ini akan kita bagikan ke masyarakat lagi, saya yakin emak emak pasti akan senang kalau dikasih cabe", kelakar Anggota DPR RI dari Dapil Kalsel 1 tersebut.

"Biaya penanaman dan perawatan cabe cukup tinggi, harga 18 ribu di tingkat petani tentunya tidak berimbang dengan biaya produksinya. Pemerintah perlu memperhatian situasi ini, harus ada strategi agar harga cabai bisa menguntungkan untuk para petani", papar Anggota Komisi III DPR RI tersebut.

Aboe Bakar meminta pemerintah memperhatikan tata niaga cabe yang ada di Indonesia, karena disinilah yang menjadi akar masalahnya.

"Saya melihat persoalan harga cabai disebabkan oleh rantai perdagangan atau tata niaga yang panjang. Harga di tingkat konsumen terakhir atau pasar jauh lebih mahal dibandingkan dari petani, penyebabnya alur distribusinya yang panjang yang dikarenakan dari petani tidak langsung ke pasar, tetapi dikuasai dahulu oleh pengepul, distributor bahkan spekulan pun ikut bermain", tukasnya.

Sementara itu Wardani salah satu petani cabai bersyukur karena sudah diborong cabai nya dan berharap bisa lebih mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah.

"Walaupun kami sudah dapat perhatian tapi mudah-mudahan kami para petani bisa mendapatkan perhatian yang lebih lagi," Kata Wardani.

HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kalimantan Selatan I

"Saya melihat persoalan harga cabai disebabkan oleh rantai perdagangan atau tata niaga yang panjang. Harga di tingkat konsumen terakhir atau pasar jauh lebih mahal dibandingkan dari petani, penyebabnya alur distribusinya yang panjang yang dikarenakan dari petani tidak langsung ke pasar, tetapi dikuasai dahulu oleh pengepul, distributor bahkan spekulan pun ikut bermain"

Masa Reses, Rafli Serap Aspirasi Hingga Salurkan Bantuan dan Renovasi Tempat Ibadah

KUTIPAN

Banda Aceh (20/10) --- Mengisi masa Reses pada paruh kedua tahun 2021 ini, Anggota DPR RI asal Aceh, Rafli melakukan serapan aspirasi dan menyalurkan berbagai jenis bantuan di sejumlah lokasi dalam dapil Aceh 1.

Selama bekerja di luar gedung DPR RI Senayan, terhitung 09 - 17 Oktober 2021, Ia terlihat menjumpai konstituen di Kawasan Pidie, Aceh Besar, dan Banda Aceh. Dipilihnya kawasan tersebut sebagai tempat pelaksanaan tugas Anggota Dewan di dapil dalam rangka menjaring, menampung aspirasi konstituen setelah pada reses sebelumnya ia sudah lakukan kunjungan di kawasan Barat Selatan Aceh.

Kepada media, seniman etnik kontemporer yang kini menduduki kursi Komisi VI DPR RI mengatakan, tujuan kegiatan masa Reses kita ini, untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada kontituen di daerah pemilihan sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan.

"Karena setiap masa reses tergolong singkat waktunya untuk kita kujungi ke semua Kabupaten/Kota yang jarak, kita lakukan kunjungan bergilir, disamping kita juga melayani melalui rumah aspirasi" Ujar Rafli, Rabu (20/10)

Kunjungan yang dilakukan, selama hampir dua pekan itu, berhasil menyerap aspirasi di tengah masyarakat dan menyalurkan bantuan dana pembangunan, renovasi tempat Ibadah serta fasilitas umum diantaranya berupa; Mushalla di Krueng Raya, Aula Masjid Istiqamah Kemukiman Lhoknga, Mushalla Desa Mon Alue, Sarana Wudhu - Toilet Masjid Palembang Darussalam, Menasah Kampong Baro di Pidie, Renovasi Rumah Layak Huni di Kawasan Barat Selatan.

"Ini hanya bentuk perhatian, agar bagaimana seluruh aspirasi masyarakat menjadi bahan masukan kita kepada Pemerintah sebagai eksekutif, yang harus sinergi dengan kita di legislatif, dalam upaya melanjutkan pembangunan tepat sasaran bagi rakyat" Tutup Rafli

RAFLI
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil NAD I

“Tujuan kegiatan masa Reses kita ini, untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada kontituen di daerah pemilihan sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan”

Bertemu Konstituen, Aleg PKS Ajak Masyarakat Kaltim Antisipasi Dampak Pemindahan IKN

KUTIPAN

Samarinda (20/10) --- Menemui tokoh-tokoh umat selepas kajian kitab Hadrotusy Syaikh Hasyim Asy'ari di Kantor DPW PKS Kalimantan Timur (16/10/2021), Aus Hidayat Nur mengajak agar sama-sama mengantisipasi dampak pemindahan Ibukota Negara ke Kaltim.

"Bagaimanapun pindahnya IKN ini akan memunculkan culture shock atau keterkejutan budaya," ingatnya di hadapan tokoh-tokoh umat dari 10 kecamatan di Samarinda.

Kyai Aus, demikian biasa disapa, menjelaskan bahwa di antara yang perlu diantisipasi dari proses pemindahan IKN adalah sikap pemerintah terhadap agama.

"Kalau sikap para pemimpin yang memindahkan IKN ini terhadap agama masih seperti yang kita saksikan saat ini, bahkan cenderung berorientasi diktator, maka IKN ini akan menjadi musibah bagi masyarakat Kaltim. Karena tidak menutup kemungkinan hanya menguntungkan pihak-pihak oligarki, para pemodal, yang terus memeras kekayaan rakyat dan alamnya," ungkapnya.

"Kita punya lagu Indonesia Raya yang sesungguhnya mewakili nilai-nilai Islam. Di situ ada lirik Bangunlah jiwanya Bangunlah badannya. Ketika membangun, maka membangunnya berorientasi kepada nilai. Makanya bangunlah jiwanya. Dan itu didahulukan dari bangunlah badannya. Cuma sayang pemerintah Jokowi ini berorientasi kepada membangun badan daripada membangun jiwa. Yang diutamakan kereta cepat, dulu bilangnya tidak pakai uang APBN, sekarang ternyata pakai uang APBN. Uang APBN itu uang rakyat," tambahnya memberikan contoh.

Anggota DPR RI Dapil Kaltim ini menjelaskan bahwa baik-buruknya pembangunan IKN ini sangat tergantung pada pemimpin yang memindahkannya.

"Kalau pemimpinnya masih seperti ini, maka kita khawatir hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu," tegasnya.

"Antisipasinya, kita perlu menyiapkan pemimpin shalih yang akan memimpin Indonesia. Misalnya Habib Dr. Salim, Ketua Majelis Syuro PKS, yang pernah menjadi Dubes RI untuk Arab Saudi dan Menteri Sosial. Sehingga bila IKN pindah, maka akan berdampak baik bagi masyarakat Kaltim, karena pemimpin yang shalih akan komitmen membangun jiwa dan menjaga kemuliaan penduduk suatu daerah," pungkasnya.

KH. AUS HIDAYAT NUR
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kalimantan Timur

> "Kalau sikap para pemimpin yang memindahkan IKN ini terhadap agama masih seperti yang kita saksikan saat ini, bahkan cenderung berorientasi diktator, maka IKN ini akan menjadi musibah bagi masyarakat Kaltim. Karena tidak menutup kemungkinan hanya menguntungkan pihak-pihak oligarki, para pemodal, yang terus memeras kekayaan rakyat dan alamnya"

PKS
Follow
Akun tiktok
Fraksi PKS DPR RI
@fraksipksdprri
fraksi.pks.id
FPKS DPR RI
fraksipksdprri
@FPKSDPRRI
PKS TV DPR RI

Rangkaian Masa Reses, Hamid Noor Yasin Kembali Hibahkan 5 Unit Mobil Ambulance PKS

KUTIPAN

Wonogiri (21/10) --- Bertempat di rumahnya di Desa Bulusulur, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Selasa (19/10) Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Dapil Jawa Tengah IV, Hamid Noor Yasin kembali menghibahkan lima unit mobil ambulance PKS.

Kelima mobil ambulance tersebut diserahkan kepada struktur pengurus PKS di Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Sragen.

Hamid Noor Yasin, saat menyerahkan mobil ambulance secara simbolis mengatakan bahwa ia berharap kader PKS bisa terus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan pelayanan, salah satunya melalui layanan mobil ambulance PKS ini.

Segala bentuk program yang menyasar masyarakat merupakan bentuk komitmen tinggi kepedulian PKS terhadap permasalahan masyarakat.

"Saya berharap dengan mobil ambulance ini, semakin memberikan semangat kepada kader PKS dalam melayani masyarakat. Banyak sekali program PKS yang menyasar masyarakat secara langsung. Hal itu tentu semakin meneguhkan bahwa PKS merupakan partai yang sangat peduli terhadap permasalahan yang ada di masyarakat. Lebih-lebih di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. PKS harus hadir melayani rakyat," kata Hamid Noor Yasin.

Muh. Haris, Ketua DPW PKS Jawa Tengah yang turut hadir mendampingi kegiatan tersebut dalam sambutannya meminta kepada seluruh anggota PKS menjadi yang terdepan dalam melayani masyarakat. Ia meminta struktur PKS yang ada hadir sampai di tingkatan terkecil, yakni RT-RW.

"Saya selalu meminta kepada seluruh anggota PKS agar menjadi yang terdepan dalam melayani masyarakat. Anggota PKS dimanapun berada merupakan citra PKS itu sendiri. Maka kami selalu memastikan anggota PKS merupakan orang-orang yang dekat dan melayani masyarakat. Bahkan sampai tingkat RT-RW," tutur Muh. Haris.

Hadir juga dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua DPW PKS Jateng, Rohadi Widodo, yang juga Wakil Ketua DPRD Karanganyar; Ketua BAPILU BPW Jatijaya, Dedy Endriyanto; anggota DPRD Jateng, Hadi Santoso, yang juga Ketua Bapilu DPW PKS Jateng; dan semua anggota DPRD FPKS Wonogiri, Sragen dan Karanganyar serta segenap jajaran pengurus DPD PKS Kabupaten Karanganyar, Wonogiri dan Sragen.

Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M.
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah IV

"Saya berharap dengan mobil ambulance ini, semakin memberikan semangat kepada kader PKS dalam melayani masyarakat. Banyak sekali program PKS yang menyasar masyarakat secara langsung. Hal itu tentu semakin meneguhkan bahwa PKS merupakan partai yang sangat peduli terhadap permasalahan yang ada di masyarakat"

Kunjungi Korban Selamat Susur Sungai, Nurhasan Zaidi: Dia Masih Trauma

KUTIPAN

Majalengka (28/10) –– Anggota DPR RI, Nurhasan Zaidi ikut merasakan duka mendalam terhadap korban susur sungai Cileueur di Kabupaten Ciamis pada pekan lalu.

Seperti diketahui, peristiwa tersebut menewaskan 11 pelajar asal MTs Harapan Baru yang mana dua pelajar di antaranya adalah warga Kabupaten Majalengka.

Bentuk dukungan terhadap korban, Zaidi didampingi Wakil DPRD Majalengka Fraksi PKS, Dhora Darojatin menyambangi korban yang selamat bernama Faisal Saiful Alip Rahmat di Desa Wangkelang, Kecamatan Cingambul, Kamis (21/10).

Zaidi menghibur Faisal yang tampak masih belum bisa melupakan peristiwa itu.

"Kita bisa lihat Faisal masih trauma karena kehilangan sahabatnya dari kecil, Aldo Maulana Majid," ujarnya.

Dalam kunjungannya ke Kabupaten Majalengka, Nurhasan Zaidi juga memberikan bantuan kepada Pemerintah Desa Paniis di Kecamatan Maja dan Desa Talaga Wetan, Kecamatan Talaga.

Zaidi memberikan program aspirasi, yakni penerangan jalan tenaga surya dan bantuan sarana keagamaan masjid.

H. NURHASAN ZAIDI, S.Sos.I
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat IX

"Kita bisa lihat Faisal masih trauma karena kehilangan sahabatnya dari kecil, Aldo Maulana Majid"

Silaturahim ke Kantor Bupati Bulukumba, Andi Akmal Serahkan Bantuan Alat Mesin Pertanian dan Program UPPO

KUTIPAN

Kabupaten Bulukumba (25/10) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin dalam rangka kunjungan kerja ke daerah pemilihan pada masa reses DPR RI mengunjungi kantor Bupati Kabupaten Bulukumba.

Kunjungan yang dibingkai dengan acara silaturahim ke kantor pemda ini merupakan wujud tanggung jawab Anggota DPR RI untuk mengadvokaasi daerahnya untuk kemajuan masyarakat.

"Alhamdulillah Alsintan (Alat mesin pertanian) dan program UPPO (Unit pengelolaan Pupuk Organik) dapat diserahkan pada kelompok-kelompok tani yang resmi terdaftar di dinas pemerintah kabupaten Bulukumba. Bantuan dari pemerintah pusat ini terutama dari kementerian pertanian telah secara rutin bergiliran di turunkan pada kabupaten atau kota sentra pertanian", tutur Akmal.

Legislator asal Sulawesi Selatan II ini secara terinci secara simbolis menyerahkan bantuan alsintan berupa Hand Sprayer, pompa air, hand traktor, dan motor tiga roda.

Akmal didampingi oleh pejabat pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba dalam rembug diskusi dengan para kelompok tani penerima bantuan menyampaikan, bahwa bantuan ini memang gratis dari pemerintah. Tapi dengan gratisnya alat-alat yang diberikan ini, ia minta di jaga dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan anggota kelompok.

"Jangan sampai bantuan ini di anggap barang habis. Tapi mesti berfikir bagaimana bantuan ini dapat melipatgandakan produktivitas hasil pertanian", Tutup Andi Akmal Pasluddin yang juga duduk di Komisi IV DPR RI ini.

Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sulawesi Selatan II

"Alhamdulillah Alsintan (Alat mesin pertanian) dan program UPPO (Unit pengelolaan Pupuk Organik) dapat diserahkan pada kelompok-kelompok tani yang resmi terdaftar di dinas pemerintah kabupaten Bulukumba. Bantuan dari pemerintah pusat ini terutama dari kementerian pertanian telah secara rutin bergiliran di turunkan pada kabupaten atau kota sentra pertanian"

Beli Beras 1 Ton di Petani Lokal, Alifudin Apresiasi Kerja Nyata PKS Kalbar

KUTIPAN

Kubu Raya (24/10) --- Pada acara Panen Perdana yang dilakukan bersama petani lokal di Desa Sungai Rengas PKS Kalbar juga membeli sebanyak 1 Ton beras yang akan Dipanen.

Hal ini guna mendukung serapan beras lokal, PKS Kalimantan Barat melaksanakan panen perdana dan melaunching gerakan konsumsi beras lokal, Minggu (24/10) di Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kubu Raya.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Alifudin mengapresiasi kegiatan panen perdana dan Launching konsumsi beras lokal, Alifudin juga mengatakan Pembelian beras sebanyak 1 Ton ini merupakan kerja nyata PKS Kalbar terhadap masyarakat khususnya para petani.

"Alhamdulillah saya bisa hadir langsung bersama para petani desa berembang, sungai rengas untuk memanen perdana padi yang sudah siap matang, dan Alhamdulillah juga PKS Kalbar langsung membeli sebanyak 1 Ton dari hasil tani di desa ini, Alhamdulillah ini sebuah kerja nyata PKS Kalbar," ujarnya.

Alifudin juga berharap dengan adanya pembelian 1 Ton beras lokal ini bisa meningkatkan produksi serta konsumsi beras lokal.

"Kalau itu terwujud, insya Allah para petani kita sejahtera, habis panen langsung laris beras nya, tidak khawatir beras nya tidak laku ketika dijual di pasar," tambahnya.

Khalid Hermawan, Ketua Bidang Tani dan Nelayan DPW PKS Kalbar mengatakan kegiatan panen perdana dan launching gerakan konsumsi beras lokal merupakan respon PKS terkait banyaknya hasil panen dan harus segera dicarikan pembelinya.

"Kami di PKS, khususnya bidang Tani dan Nelayan melihat potensi petani lokal harus di apresiasi, untuk itu hari ini kami bersama jajaran petinggi PKS lainnya melakukan panen perdana sekaligus melaunching gerakan konsumsi beras lokal, langsung beli dari petani, atau beras yang benar-benar berasal dari daerah kita sendiri," ujarnya.

Khalid mengatakan, dengan adanya kegiatan ini PKS ingin membantu para petani langsung agar tidak khawatir tidak ada yang beli ketika panen dan padi nya sudah digiling.

"Iya kita siap membeli hasil panen para petani, dan dengan adanya kegiatan ini kami harap petani menjadi fokus untuk menjaga dan merawat lahannya agar bisa segera di tanam kembali," jelas Khalid yang juga ketua KTNA Kalbar.

Arif Joni, ketua DPW PKS Kalbar yang turut hadir juga mengatakan komitmen nya terkait beras lokal hasil petani.

"Kita sangat mendukung dengan berbagai macam cara agar Petani Kita Sejahtera, PKS menghimbau kepada seluruh anggotanya agar mengonsumsi beras lokal dari petani," ujarnya.

Arif Joni juga meminta kepada seluruh anggota DPRD asal PKS saat reses atau kegiatan, serta berbagai macam baksos lainnya untuk memanfaatkan beras lokal yang ada di daerahnya masing-masing.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

H. ALIFUDIN, S.E.,M.M
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kalimantan Barat I

> "Kami di PKS, khususnya bidang Tani dan Nelayan melihat potensi petani lokal harus di apresiasi, untuk itu hari ini kami bersama jajaran petinggi PKS lainnya melakukan panen perdana sekaligus melaunching gerakan konsumsi beras lokal, langsung beli dari petani, atau beras yang benar-benar berasal dari daerah kita sendiri,"

Masa Reses, Toriq Hidayat Ringankan Beban Tiga Anak Yatim Piatu di Dapil

KUTIPAN

Toriq terharu melihat ketiganya terlihat tegar dan sabar, serta menerima takdir Alloh SWT. Selain memberikan bantuan tunai kepada mereka, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Politis PKS ini juga berjanji akan memberikan bantuan pendidikan.

Tasikmalaya (24/10) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Toriq Hidayat pada masa reses nya mengunjungi tiga orang anak di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, yang menjadi yatim piatu dan saat ini diasuh sementara oleh pamannya.

Ketiga anak yatim piatu bernama Santi Pertiwi, Yanti Rosmayanti, dan Padlan Nurrohman. Ketiganya adalah warga Desa Neglasari Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya.

`Meski kedua orang tua telah tiada, mereka masih terlihat semangat tanpa memperlihatkan rasa sedih dan duka. Padahal ayah dan ibu mereka meninggal dalam waktu yang berdekatan, akibat sakit.

Toriq terharu melihat ketiganya terlihat tegar dan sabar, serta menerima takdir Alloh SWT. Selain memberikan bantuan tunai kepada mereka, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Politis PKS ini juga berjanji akan memberikan bantuan pendidikan.

"Saya sangat terkesan dengan sikap anak-anak ini. Tegar, sabar dan menerima takdir Alloh. Yang sulung sudah bekerja. Sedang kedua adiknya masih sekolah. In sya Alloh saya akan bantu pendidikannya hingga selesai," sebut Aleg asal Tasikmalaya ini.

Toriq menawarkan buat Padlan selepas SD melanjutkan sekolah di SMP Jabal Torik Kabupaten Tasikmalaya dengan beasiswa full. Sedang untuk Yanti yang sekarang duduk di kelas 3 Madrasah Aliyah ditawarkan bantuan berupa advokasi PIP Kuliah.

"Saya doakan bagi ketiganya, semoga menjadi anak yang sholeh dan sholehah. Selalu berbakti kepada kedua almarhum orang tuanya. Dengan selalu mendoakan mereka. Bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan pendidikannya. Dan Bermanfaat bagi agama dan bangsa," ucapnya.

Toriq menilai kehidupan ini ibarat roda berputar. Satu waktu diatas, lain waktu berada di bawah. Mungkin saja saat ini ketiganya menunggu uluran tangan orang lain. In sya Alloh di saat lain justru mereka yang memberikan uluran tangannya.

KH. TORIQ HIDAYAT, Lc
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat XI

"Saya doakan bagi ketiganya, semoga menjadi anak yang sholeh dan sholehah. Selalu berbakti kepada kedua almarhum orang tuanya. Dengan selalu mendoakan mereka. Bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan pendidikannya. Dan Bermanfaat bagi agama dan bangsa"

Bendungan Leuwikeris Terganjal Ketersediaan Lahan, Aleg PKS Akan Cari Tahu

KUTIPAN

Tasikmalaya (21/10) --- Kepala Bidang Pelaksanaan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Sugeng Harianto mengatakan, masih ada tujuh hektar lahan pembangunan Bendungan Leuwikeris yang belum dibebaskan.

Terkait dengan kondisi ini, Anggota Komisi V DPRI RI dari Fraksi PKS, Toriq hidayat akan mencari tahu penyebab tertahannya pengambilalihan sisa lahan untuk pendirian bendungan di kabupaten Ciamis tersebut. Ia ingin proyek ini selesai sesuai target yakni pada tahun 2022.

"Dari Informasi yang di dapat, lahan yang belum dibebaskan tersebut merupakan milik Pemda. Namun Hingga saat ini masih diproses oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Bendungan Leuwikeris. Saya akan cari tahu mengapa prosesnya belum selesai. Berlarurt-larut," kata Politisi PKS asal Dapil Jabar XI.

Toriq menyebutkan, Pengerjaaan Konstruksi bendungan yang telah dimulai sejak tahun 2016 lalu itu dan kini sudah tembus 82 persen seharusnya selesai sesuai target. Apalagi Bendungan Leuwikeris merupakan salah satu Program Strategis Nasional Bidang Sumber Daya Air yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2020.

Aleg Pusat dari Tasikmalaya ini menjelaskan pentingnya pembangunan bendungan Leuwi Keris. Salahsatunya bertujuan untuk peningkatan volume tampungan air. Dengan begitu dapat memasok air irigasi ke lahan pertanian di sekitarnya, penyediaan air baku dan sekaligus pengendalian banjir.

"Saat ini sungai Citanduy belum memiliki bendungan. Sekiranya bendungannya sudah rampung, maka kesinambungan pasokan air ke sawah terjaga. Selama ini lahan pertanian kerap mengalami banjir saat musim hujan dan kekurangan air pada musim kemarau," kata Toriq.

Ia sangat berharap Pembangunan Bendungan Leuwikeris memberikan lima solusi bagi masyarakat di kabupaten dan kota sekitarnya. Yakni suplai air irigasi untuk Lakbok Utara di Ciamis sekitar 6.000 hektare. Begitu juga dengan Manganti di Cilacap sekitar 4.000 hektare. Yang diharapkan dapat mendorong peningkatan indeks pertanian (IP).

"Berikutnya menyediakan air baku sebesar 845 liter/detik untuk Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya, dan Ciamis. Kemudian mereduksi banjir, berpotensi menjadi sumber daya listrik untuk PLTA, kawasan konservasi air tanah, perikanan dan destinasi pariwisata," tutup Toriq.

KH. TORIQ HIDAYAT, Lc
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat XI

> "Saat ini sungai Citanduy belum memiliki bendungan. Sekiranya bendungannya sudah rampung, maka kesinambungan pasokan air ke sawah terjaga. Selama ini lahan pertanian kerap mengalami banjir saat musim hujan dan kekurangan air pada musim kemarau,"

Silaturahim dengan Walikota Jaktim

Anis Tegaskan Kolaborasi Legislatif dan Eksekutif Ditingkatkan

KUTIPAN

Jakarta (24/10) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS daerah pemilihan Jakarta Timur, Anis Byarwati, bersilaturahim dengan mengunjungi Walikota Jakarta Timur, Muhammad Anwar, di Kantor Walikota Jakarta Timur.

Silaturahmi ditujukan untuk terjalinnya sinergi dan kolaborasi antara legislatif dan eksekutif untuk Jakarta Timur yang lebih baik.

Anis menegaskan bahwa kolaborasi antara anggota DPR RI dengan pihak pemerintah Kotamadya Jakarta Timur dilakukan untuk saling support program pemberdayaan warga Jakarta Timur.

"Secara khusus, dalam proram pemberdayaan masyarakat terkait kesejahteraan ekonomi melalui pemberdayaan pelaku UMKM," tutur Anis.

Dalam kesempatan ini, politisi senior PKS ini menyampaikan Jakarta Timur adalah amanah kita semua. "Maka apa yang bisa kita berikan, berikanlah sepenuhnya untuk mensejahterakan masyarakat Jakarta Timur", ujarnya.

Anis mengatakan dengan hadirnya produksi masyarakat seperti batik khas Jakarta, hendaknya dijadikan sebagai peluang pemberdayaan ekonomi dengan melakukan optimalisasi produksi dan pemasarannya.

"Munculnya sebuah produk hasil karya masyarakat yang dibutuhkan oleh banyak orang, pastinya menyerap dan membuka lapangan kerja baru dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Dan ini peluang yang sangat baik," kata Anis.

Dengan dukungan dari pemerintah kota yang responsif dan progresif, maka Langkah selanjutnya adalah dilakukannya evaluasi secara berkala untuk meningkatkan kualitas kinerja pemberdayaan UMKM tersebut. Selain itu, pendampingan, pengawasan, dan kolaborasi dengan legislatif akan mendorong terbentuknya iklim pemberdayaan yang lebih kuat.

"Jika pola kerjanya sudah terbentuk dengan baik, maka saya hal itu menjadi terobosan yang bagus sehingga Jakarta Timur memiliki harapan untuk menjadi lebih baik lagi," papar Anis.

Pada pertemuan yang penuh rasa kekeluargaan ini, Anis menyerahkan 5 Jilid Buku Kinerja Dakwah Parlemen yang merupakan rekam jejak perjalanannya sebagai anggota DPR.

Penyerahan ini diterima langsung oleh Walikota Jakarta Timur yang menyambutnya dengan sangat baik mengingat tidak banyak anggota legislative yang mendokumentasikan kinerjanya dalam bentuk buku. Anis pun menyampaikan rasa terimaksihnya atas penerimaan yang sangat terbuka dan hangat dari pihak Walikota untuk bersama-sama memajukan Jakarta Timur.

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta I

"Kolaborasi antara anggota DPR RI dengan pihak pemerintah Kotamadya Jakarta Timur dilakukan untuk saling support program pemberdayaan warga Jakarta Timur. Secara khusus, dalam proram pemberdayaan masyarakat terkait kesejahteraan ekonomi melalui pemberdayaan pelaku UMKM"

Ikutilah

مسابقة قراءة الكتاب فتح المعين

Diselenggarakan Dalam Rangka
Milad Fraksi PKS DPR RI Ke-17 dan
Hari Santri Nasional 2021

PKS

LOMBA BACA KITAB KUNING V TINGKAT NASIONAL 2021

KITAB YANG DIBACA

Kitab yang dibaca adalah Kitab Fathul Mu'in Karya Syaikh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malbary

SYARAT PESERTA

1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Putra/Putri
3. Usia 17 - 25 tahun
4. Pendidikan minimal Madrasah Aliyahatau yang sederajat
5. Belum pernah menjadi juara 1 - 3 Lomba Kitab Kuning FPKS tingkat Nasional (2016-2020)

Raih Juaranya Rebut Hadiahnya

Juara 1	**UMRAH (Rp 30.000.000)**	Juara Harapan 1	**Rp 15.000.000,-**
Juara 2	**Rp 25.000.000,-**	Juara Harapan 2	**Rp 10.000.000,-**
Juara 3	**Rp 20.000.000,-**	Juara Harapan 3	**Rp 5.000.000,-**

Setiap Peserta akan mendapat sertifikat yang ditanda tangani oleh Ketua Majlis Syura, Presiden PKS dan Ketua Fraksi PKS DPR RI

HADIAH UTAMA
UMRAH

PENDAFTARAN

Link Pendaftaran online:
https://bit.ly/lbkkvirtual2021fraksipks

AGENDA PELAKSANAAN

Masa Pendaftaran
20 Oktober - 13 November 2021
Babak Penyisihan di 34 Provinsi akan diselenggarakan antara 14 November hingga 2 Desember 2021 bertempat di Kantor Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) di 34 Provinsi se Indonesia.
Babak Final: Rabu 8 Desember 2021

NARAHUBUNG

0856-4554-6397 Agus. A. Wahid MG, SPd, M.Sc.
0822-6062-1141 Susiati Puspasari, B.Sc., M.Sc.
0813-2025-0848 Iman Sulaiman, Lc.
0813-8642-7673 Dr. Suesilowati

DEWAN JURI

KH. Syuhada' Syarkun, S.Ag., M.HI.
(Santri Tebuireng-Jombang Jatim)
KH. DR. Muslih Abdul Karim, MA
(Ketua Umum MAPADI)
Dr. KH. Ali Akhmadi, MA, Al-Hafidz
(Ketua BPU-DPP PKS)

17 FPKS DPR RI

Habib **Dr. Salim** Segaf Aljufri, MA
Ketua Majelis Syuro PKS

Dr. H. Jazuli Juwaini, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.Psi.T
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

fraksi.pks.id | FPKS DPR RI | fraksipksdprri | @FPKSDPRRI | FPKS TV DPR RI

Nur Azizah Dukung Aksi Sosial Ladies Speed Bekasi Dirikan Majelis Taklim dan Rumah Perlindungan Anak

KUTIPAN

Bekasi – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A., M.A. mendukung penuh Kelompok Pengemudi Ojek Online Wanita (Ladies Speed) di Kota Bekasi yang melakukan aksi sosial dan keagamaan

Dengan mendirikan Majelis Taklim Ladies Speed dan mendirikan Rumah Perlindungan Anak bagi anak-anak para pengemudi ojek online yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Hal itu disampaikan Nur Azizah dalam kegiatan Seminar Sosialisasi Peran Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan Dalam Perlindungan Perempuan dan Anak, yang diselenggarakan melalui Kerjasama Nur Azizah selaku Anggota Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA RI), pada SAbtu (16/10) di Jl. Kemakmuran No. 45, Kota Bekasi.

Heni Fitrianti, Ketua Majelis Taklim Ojek Online se Indonesia sekaligus Ketua Ladies Speed Nasional, menyampaikan sangat bergembira karena diberi kesempatan untuk dapat bertemu langsung dengan Nur Azizah.

"Saya hadir di sini karena takdir Allah dan saya sangat bersyukur. Saya ingin teman-teman saya khususnya yang di Bekasi ini dapat terhubung langsung dengan para motivator, seperti Ibu Nur", ungkap Heni.

Heni yang berdomisili di Kota Bogor ini sengaja datang ke Bekasi untuk bertemu Nur Azizah. Ia juga menceritakan di hadapan Nur Azizah bahwa saat ini, di setiap pekan ibu-ibu Majelis Taklim Ladies Speed rutin mengadakan pos-pos pengajian dengan berpakaian lengkap Ojol.

"Setelah dari pengajian mereka langsung menarik. Alhamdulilah Majelis Taklim ibu-ibu Ojol ini sudah berjalan selama 6 bulan di Kota Bekasi. Di Jatiasih", imbuhnya.

Heni turut menyampaikan, ia bersama para anggota Majelis Taklim ini juga konsern pada permasalahan anak. Kini Heni membuka Rumah Ojol untuk anak-anak yang putus sekolah, dari mulai SD, SMP dan SMA mereka makan dari donasi para ojol berupa ovo 2.000.

Donasi ini secara rutin dikumpulkan setiap pagi, dan merupakan infaq subuh para ojol. "Karena saya tidak punya Lembaga, jadi saya cukup mengajarkan mereka seadanya. Yang mondok itu saat ini ada di sebelah rumah saya, rumah itu dipinjamkan juga setiap hari untuk mereka sekolah. Mereka ini merupakan korban kekerasan dari orangtuanya", papar Heni.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A.,M.A.
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VI

"Untuk mengatasi permasalahan ini melalui KemenPPPA harus ada upaya koordinasi lanjutan dengan dinas-dinas terkait untuk pemenuhan hak anak-anak ini. Saya salut, dengan adanya Majelis Taklim Ladies Speed ini dapat menjadi wadah tidak hanya menimba ilmu agama, tapi juga menjadi wadah aksi-aksi sosial kemasyarakatan"

Reses di Bekasi, Nur Azizah Temui Banyak Warga Terjebak Hutang Rentenir

KUTIPAN

Bekasi – Anggota Komisi VIII DPR RI Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A., M.A., dalam rangkaian Reses ke- 6 Masa Persidangan 1 tahun 2021-2022, pada Jumat (15/10),

Nur Azizah temui banyak warga khususnya di wilayah Kelurahan Jakamulya, Bekasi Selatan – Kota Bekasi, di Masa Pandemi yang terjerat hutang rentenir.

Hal itu disampaikan oleh Ir. H. Eko Susanto, Pengurus RW 10 Graha Indah, Kelurahan Jakamulya. Banyak Warganya yang terjerat hutang rentenir karena terhimpit ekonomi di masa pandemi.

"Rentenir yang beroperasi di wilayah RW 10 saja saat ini ada 27 orang renternir. Mereka orang luar, bukan warga sini. Yang terjerat dengan rentenir itu ada sekitar 208 orang warga yang mana bervariasi pinjamannya, mulai dari 500 ribu, 1 juta, sampai 5 juta. Tentu ini sangat miris", jelas Eko.

Eko menambahkan, baru-baru ini pengurus RW bersama warga sudah membuat gebrakan spanduk bertuliskan daerah bebas rentenir. Tetapi hanya berupa tulisan saja, tidak ada solusinya.

"Akhirnya kami dari pengurus RW membentuk koperasi, alhamdulillah saat ini sudah berbadan hukum resmi, memiliki NPWP resmi, kemudian sudah membuka rekening di Bank. Namun, masih belum jalan, kami baru sebatas mengurus legalitasnya saja. Insya Allah bulan depan akan jalan dengan swadaya masyarakat", imbuhnya.

Kondisi warga yang terjerat pinjaman rentenir ini sangat memprihatinkan, oleh karena itu Eko bersama warga lainnya bertekad untuk mendirikan koperasi. Dengan Koperasi yang legal, dan pengurus yang kredibel, juga akan menggandeng kawan-kawan yang punya kepedulian sosial untuk mensejahterakan warga RW 10.

Ia berharap juga ada perhatian khusus dari pemerintah untuk memberantas para rentenir ini yang meresahkan.

"Para rentenir ini banyak berkumpul di luar Komplek Graha, di perkampungan dari pagi sampai tengah malam, karaokean sampai tengah malam, itu tentu meresahkan, mereka warga luar yang mencekik warga kita dengan jeratan rentenir. Warga kita dicekik, sementara para rentenirnya hura-hura. Jadi akan kami lawan dengan koperasi", papar Eko.

Menanggapi hal tersebut Nur Azizah turut mengecam keberadaan rentenir di tengah pemukiman warga. Selain itu, ia mengingatkan perlu ada edukasi kepada masyarakat akan bahaya masuk dalam jeratan hutang rentenir.

"Sebagaimana dalam Islam telah mengharamkan riba, di sini kita harus paham perilaku riba yang dilakukan rentenir dan yang meminjam ini, dapat merusak tatanan di masyarakat", kata Nur Azizah.

Dengan adanya pandemi yang berkepanjangan ini juga semakin banyak anak-anak muda yang susah cari kerja. Banyak yang sudah lulus kuliah belum dapat kerja, yang sudah kerja kena PHK. Untuk mengatasi itu, RW 10 juga akan berkolaborasi dengan Yayasan Rumah Dhuafa Indonesia Mandiri yang mengelola SMK Bangun Persada.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A.,M.A.
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VI

"Nur Azizah turut mengapresiasi upaya Eko beserta warga RW 10 dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nur Azizah berharap, hal serupa dapat dicontoh oleh wilayah-wilayah lain di Kota Bekasi khususnya. Dan RW 10 Kelurahan Jakamulya, Bekasi Selatan ini dapat menjadi RW Percontohan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di masa Pandemi.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Salurkan

ASPIRASI ANDA

DI HARI ASPIRASI FRAKSI PKS DPR RI

Kegiatan Aspirasi dilaksanakan
setiap Selasa dan Jum'at.

Ajuan Aspirasi

Isi via website form : https://fraksi.pks.id/form-aspirasi-2/

Saat Reses, Rofik Siap Kawal Produk Herbal Indonesia Tembus ke Pasar Global

KUTIPAN

Dubai (28/10) --- Anggota DPR RI Rofik Hananto bersama pengusaha Digital Marketing Fahmi M Hanif, serta sejumlah pengusaha jamu herbal yang tergabung dalam Perkumpulan Pelaku Jamu Alami Indonesia (PPJAI) wilayah kerja Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen (Barlingmascakeb) mengunjungi Expo 2020 Dubai, Uni Emirat Arab.

Acara ini awalnya digelar tahun lalu namun diundur karena pandemi Covid-19.

Pada ajang ini, Rofik memperkenalkan PPJAI kepada Duta Besar RI untuk Uni Emirat Arab, Husin Bagis.

Husin menerima langsung rombongan PPJAI di kantor Indonesia Trade Promotion Centra (ITPC) di Dubai, didampingi oleh Kepala ITPC Muhammad Khomaini.

Pada kesempatan ini pula, dibahas bagaimana produk jamu herbal Indonesia dapat menembus pasar luar, terutama pasar Timur Tengah melalui Dubai. Hal ini mendapat dorongan dari Husin.

Menanggapi hal tersebut, Rofik menyambut dengan baik dorongan dari Husin.

Rofik optimis bahwa produk jamu herbal Indonesia bisa tembus pasar global.

"Saya sendiri yang mengawal agar target menembus pasar internasional berhasil," ujar Aleg dari Dapil Jawa Tengah VII tersebut.

Menurutnya, penerimaan pasar nasional yang sudah terbukti dan perizinan BPOM dan Halal MUI yang sudah dikantongi menjadi modal kuat produk jamu herbal Indonesia bisa menembus pasar internasional.

Ketua PPJAI Mukit Hendrayatno mengapresiasi dukungan Husin Bagis dan Rofik Hananto.

Menurutnya, kualitas jamu herbal khususnya yang bahannya berasal dari wilayah Banyumas Raya bisa dijamin kualitasnya.

Namun tidak cukup mengandalkan kualitas apabila ingin menembus pasar internasional, ujar ketua PJAI tersebut.

"Kita perlu membuat kemasan dan media promosi yang tepat. Dengan dukungan pemerintah saya harap produk segera masuk ke pasar Dubai secara resmi," imbuhnya.

H. ROFIK HANANTO, S.E
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah VII

Saya sendiri yang mengawal agar target menembus pasar internasional berhasil, penerimaan pasar nasional yang sudah terbukti dan perizinan BPOM dan Halal MUI yang sudah dikantongi menjadi modal kuat produk jamu herbal Indonesia bisa menembus pasar internasional.

Bukhori Serahkan Bantuan 2 Ribu Paket Beras dan Masker di Dapil

KUTIPAN

Kabupaten Kendal (27/10) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf mengisi kegiatan reses di daerah pemilihan Kabupaten Kendal

dengan menyerahkan bantuan beras bagi warga terdampak pandemi. Bantuan beras ini merupakan hasil advokasi nya dengan Kementerian Sosial.

Serah terima bantuan dilakukan di kantor Desa Pagersari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal.

"Alhamdulillah hari ini kami berkesempatan menyalurkan bantuan sebanyak dua ribu paket beras bagi warga terdampak pandemi di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal," terang Bukhori selepas acara serah terima, Minggu (24/10/2021).

Selain memberikan bantuan beras, legislator daerah pemilihan Kabupaten Kendal ini juga berkunjung ke salah satu puskesmas di kabupaten itu untuk menyerap aspirasi tenaga kesehatan setempat. Dalam kesempatan itu politisi PKS ini disambut langsung oleh Kepala Puskesmas dan jajarannya.

"Sebagaimana kita ketahui, puskesmas merupakan ujung tombak dalam penanganan pandemi. Pekerjaan para tenaga kesehatan di sini sejatinya penuh risiko. Namun atas nama dedikasi terhadap kemanusiaan, mereka bersedia mengambil peran berani itu. Maka sudah sepatutnya negara mengapresiasi peran setiap puskesmas di masa pandemi," jelas Bukhori.

Bukhori mengakhiri persamuhannya di puskesmas dengan menyerahkan bantuan masker bagi tenaga kesehatan. Dalam acara serah terima itu, bantuan langsung diberikan kepada Kepala Puskesmas setempat.

KH. BUKHORI, Lc., M.A.
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah I

"Sebagaimana kita ketahui, puskesmas merupakan ujung tombak dalam penanganan pandemi. Pekerjaan para tenaga kesehatan di sini sejatinya penuh risiko. Namun atas nama dedikasi terhadap kemanusiaan, mereka bersedia mengambil peran berani itu. Maka sudah sepatutnya negara mengapresiasi peran setiap puskesmas di masa pandemi"

Perkuat Hubungan RI-Turki, HNW: Tidak dengan Jadikan Kemal Pasya Ataturk Nama Jalan di Jakarta

KUTIPAN

Jakarta (19/10) --- Anggota DPR yang juga Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, mendukung penguatan hubungan Indonesia dengan Turki, tapi mengkritik dan menolak wacana penyematan nama tokoh anti demokrasi, islamophobia, dan bapak sekulerisme Turki, Mustafa Kemal Attaturk, menjadi nama jalan di Jakarta.

Menurut pria yang akrab disapa HNW, selain tidak cocok dengan karakteristik Jakarta dan Indonesia yang religius dan demokratis, juga tidak sesuai dengan ketokohan Soekarno yang tidak anti Islam, tidak anti Arab, religius dan tidak sekuler, serta demokratis.

HNW sapaan akrabnya mengatakan apabila wacana tersebut dihadirkan sebagai tata krama diplomatik karena Turki telah menyematkan nama proklamator Indonesia, Ahmet Soekarno, sebagai jalan di depan KBRI Ankara, maka Pemerintah Indonesia bisa mengusulkan nama-nama yang lain selain Attaturk.

"Yaitu nama-nama Tokoh Turki yang tidak kontroversial dan yang bisa hadirkan penguatan hubungan karena nama-nama itu begitu harum diterima masyarakat luas di Indonesia seperti Sultan Muhammad alFatih atau tokoh Sufi Jalaludin ar Rumi," ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (18/10).

Lebih lanjut, HNW mengatakan bahwa masalah ini sudah jadi perhatian masyarakat luas, yang mayoritas mutlaknya menyatakan menolak, secara rasional dan argumentatif.

Tercatat pihak Pimpinan MUI Pusat, PP Muhammadiyah, Sekjend PBNU, KAHMI, Ketua MUI DKI, Wakil Ketua MPR, Ketua BKSAP DPR RI, Wakil Ketua DPRD DKI dari PKS, telah menyampaikan penolakan mereka secara terbuka.

"Bahkan Saya dalam 3 titik reses kemarin di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat, juga menerima aspirasi dari tiga komunitas warga (para Pimpinan RT dan RW, Pimpinan Pengajian Shubuh dan Pimpinan Jawara Betawi), yang secara terus terang menyampaikan keberatan dan penolakan mereka atas wacana penamaan jalan di Menteng Jakarta dengan nama Mustofa Kemal Ataturk.

"Aspirasi dari banyak kelompok masyarakat yang menolak ini tentunya juga sudah dibaca oleh pihak Turki, dan karenanya penting menjadi perhatian Pemerintah Indonesia, Pemprov DKI Jakarta dan pihak Kedubes RI di Ankara," ungkapnya.

Semua pihak di Indonesia, imbuhnya, mendukung penguatan hubungan RI dengan Turki.

"Tetapi masih banyak nama-nama tokoh Turki yang terhormat dan tidak kontroversial, dan diterima Umat Islam di Indonesia, seperti Sulaiman Al Qanuny, Muhammad Al Fatih, atapun penyair Islam dan tokoh Sufi yang lama menetap di Turki Jalaludin Rumi, yang bisa menjadi simpul penguat hubungan kedua belah pihak," tambahnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta II

"Aspirasi dari banyak kelompok masyarakat yang menolak ini tentunya juga sudah dibaca oleh pihak Turki, dan karenanya penting menjadi perhatian Pemerintah Indonesia, Pemprov DKI Jakarta dan pihak Kedubes RI di Ankara,"

PKS

BIO GRAFIS

Yuk Kenali Aleg Kamu

SYAHRUL AIDI MAZAAT

Profil

- Nama Lengkap
  H. Syahrul Aidi Maazat, Lc, MA.
- Tempat, Tanggal Lahir
  Kampar, 21 September 1977
- Dapil
  Riau II (Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kuantan Singingi, dan Pelalawan).

Keluarga

- Istri : **Bitriyanti**
- Anak : **4 Laki-Laki**
  2 Perempuan

Pendidikan

- **Ponpes Islamic Centre Al-Hidayah Kampar**
- **S1 Al-Azhar Kairo Mesir**
- **S2 Univ. Al-Albayt Jordan**

Riwayat Organisasi

- **Ketua BAZNAS Kab. Kampar**
- **Sekum DPD PKS Kab. Kampar**
- **Ketua IKMI Kab. Kampar**
- **Bendahara MUI Kab. Kampar**

Riwayat Pekerjaan

- **Dosen Ma'had Ali Al-Badr Bangkinang**
- **Dosen UIN Suska Riau**
- **Anggota DPRD Kab. Kampar**
- **Anggota DPR RI**

Media Sosial

- : H. Syahrul Aidi, Lc.,MA
- : @syahrulaidi_mz
- : @syahrulaidi
- : Syahrul Aidi Maazat

Desain : Aditya Angga

fraksi.pks.id | Fraksi PKS DPR RI | fraksipksdprri | @fpksdprri | PKS TV DPR RI

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Di Acara Women Leadership Forum, Nevi Bicara Personal Branding dan Medsos Istri Pimpinan Daerah

KUTIPAN

Jakarta (25/10) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal Sumatera Barat II, Nevi Zuairina pada women Leadership Forum yang digelar oleh Bidang Pembinaan Kepala Daerah menyampaikan pentingnya Personal Branding dan Medesos bagi pemimpin wanita terutama kepala daerah.

Acara yang digelar secara daring pada 23 Oktober 2021 ini juga menghadirkan Gubernur NTB sebagai Keynote Speaker.

"Personal branding di era digital saat ini menjadi sesuatu yang unik dan mampu memberikan keuntungan lebih bagi mereka yang berhasil menjalankannya dengan baik. Terutama melalui media sosial. Personal branding merupakan suatu proses atau aktivitas dari setiap individu untuk menampilkan citra dirinya kepada orang lain dengan tujuan mengenalkan segala hal yang positif melekat pada seorang publik figur", tutur Nevi dalam sambutan Webinar Bimtek Kehumasan istri Pimpinan Daerah ini.

Nevi yang saat ini menjadi Ketua Biro Istri Pimpinan Daerah Bidang Pembinaan Kepala Daerah DPP PKS menguraikan, bahwa saat ini kita mengenal istilah selebgram dan youtuber.

"Istilah ini adalah hasil dari personal branding yang dilakukan secara terus-menerus di media sosial dengan menggunakan strategi dan konten yang telah direncanakan dengan baik sesuai dengan citra seperti apa yang ingin ditampilkan," ungkapnya.

Sehingga, imbuhnya, setiap pengguna media sosial pada dasarnya memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan ruang mempromosikan diri dan menunjukkan perbedaan karakter kita dengan orang lain.

"Termasuk para istri tokoh masyarakat. Karena Disadari atau tidak, melalui media sosial masyarakat bisa secara langsung mengamati dan menilai kita," jelas Nevi.

Legislator yang duduk di Komisi VI DPR ini mengutip data terbaru dari We Are Social menyebutkan pada tahun 2020 ada sekitar 160 juta pengguna aktif media sosial di Indonesia, dan ini akan terus meningkat seiring berjalannya waktu.

"Tujuan dari personal branding di media sosial memang beragam, mulai dari membuat dan menjaga citra baik hingga mencari keuntungan. Maka dari itu seharusnya kita sebagai tokoh masyarakat dan perwajahan partai politik juga harus memahami pentingnya personal branding dalam kehidupan di dunia maya", jelasnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

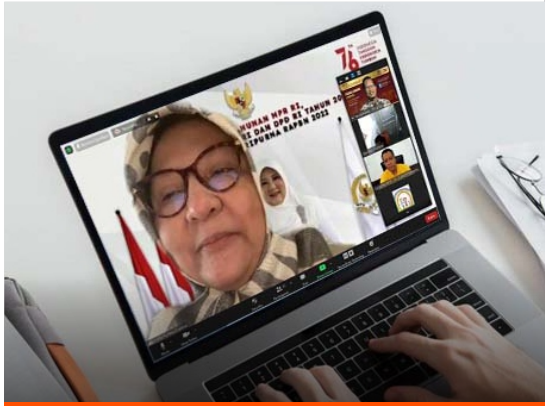

Hj. NEVI ZUAIRINA
Anggota Komisi VI DPR RI

"Personal branding di era digital saat ini menjadi sesuatu yang unik dan mampu memberikan keuntungan lebih bagi mereka yang berhasil menjalankannya dengan baik. Terutama melalui media sosial. Personal branding merupakan suatu proses atau aktivitas dari setiap individu untuk menampilkan citra dirinya kepada orang lain dengan tujuan mengenalkan segala hal yang positif melekat pada seorang publik figur"

Bimtek Anggota DPRD se-SumBagUt

Nevi: Tingkatkan Kualitas dan Sinergitas Mengemban Amanah Rakyat

KUTIPAN

Jakarta (26/10) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal Sumatera Barat II, Nevi Zuairina pada acara Bimbingan Teknis Anggota DPRD Se Sumatera Bagian Utara berkesempatan menjadi pembicara dengan tema peningkatan kualitas dan sinergitas Aleg agar siap mengemban amanah melayani dan membela rakyat.

Acara yang diinisiasi oleh Bidang Pembinaan Wilayah Sumatera Bagian Utara DPP PKS ini menekankan agar Optimalisasi peran anggota DPRD dalam mewujudkan pelayanan paripurna bagi masyarakat menjadi ruang lingkup kerja yang akan di evaluasi secara terus menerus.

"Sesuai dengan visi PKS yang menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasiona bangsa Indonesia, Kita semua selaku pejabat publik mulai dari pusat, Propinsi dan Kabupaten Kota mesti meningkatkan kualitas dan sinergitas agar siap mengemban amanah melayani dan membela rakyat", tutur Nevi.

Legislator asal Sumatera Barat II ini menekankan, agar pejabat publik PKS dapat berperan serta dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk nyatanya adalah menyerap, menghimpun dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.

"Di setiap moment kerja dan kinerja kita, tidak melihat siklus waktu perhelatan demokrasi, kita semua sebagai anggota PKS yang merupakan warga negara Indonesia, mesti dapat beroeran melibatkan masyarakat berupa rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender", ucap Nevi.

Untuk itu, lanjut Nevi, tentu kita perlu memberikan dengan maksimal pelayanan yang berkualitas dan pembelaan kepada masyarakat Indonesia. Sehingga masyarakat merasakan manfaat dari kehadiran PKS dan akan dengan senang hati mendaftarkan diri menjadi anggota PKS.

Politisi PKS ini menjelaskan, semua anggota dewan harus bersinergi satu sama lain baik lintas dapil maupun lintas tingkatan.

"Hal ini sangat penting, karena Kreativitas kolektif dapat dibangkitkan dengan jalan bekerjasama. Namun hubungan kerjasama tidak semata-mata untuk membangun kebersamaan, tetapi juga membangun interaksi yang dapat memacu daya pikir masing-masing dalam memberikan pelayanan yang berkualitas tadi," ungkapnya.

Hubungan interaktif antar anggota yang saling dukung, pada akhirnya akan menghasilkan gagasan baru, yang akan meningkatkan kualitas dan kesinambungan layanan partai.

"Kita semua harus siap bekerja, Agar sang maha pencipta akan melihat pekerjaan kita. Semoga Allah menjadikan aktiftas kita dalam kerja kerja kedewanan ini sebagai ladang kebaikan dan kegiatan ibadah untuk bekal dihari akhir", tutup Nevi Zuairina.

Hj. NEVI ZUAIRINA
Anggota Komisi VI DPR RI

> “Kita semua harus siap bekerja, Agar sang maha pencipta akan melihat pekerjaan kita. Semoga Allah menjadikan aktiftas kita dalam kerja kerja kedewanan ini sebagai ladang kebaikan dan kegiatan ibadah untuk bekal dihari akhir”

Buka Program Sekolah Perempuan PKS, Anis Tegaskan Personal Branding Bukan Pencitraan

KUTIPAN

Jakarta (20/10) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menghadiri Webinar dan Launching Sekolah Perempuan PKS yang diselenggakatan oleh Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) PKS Jakarta Utara.

Pada acara yang turut dihadiri oleh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Yusriah Dzinnun, Ketua DPD PKS Jakarta Utara, Ahmad Mardono, dan Ketua BPKK DPD PKS Jakarta Utara, Fatihah Ekawati, Anis didaulat menjadi narasumber dengan tema Cara Membangun dan Mengokohkan Personal Branding.

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menjelaskan bahwa personal branding adalah bagaimana cara mengembangkan keunikan yang membuat diri kita lebih menarik dari orang lain.

"Personal Branding adalah seni untuk menjadi diri sendiri, serta seni untuk menepati dan membuktikan janji tentang diri sendiri kepada orang lain. Bukan sekedar promosi profilnya," papernya.

Oleh karena itu, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jakarta Timur ini menegaskan bahwa personal branding bukanlah bentuk dari sebuah pencitraan. Personal branding tidaklah memanipulasi diri untuk menutup kelemahan tetapi ingin menonjolkan kelebihan diri dari apa yang dikuasainya.

"Orang yang memiliki tujuan pencitraan, sikapnya akan cendrung mengada-ada, membohongi diri sendiri, dan tidak natural. Ia akan sangat abai dengan kelemahannya dan malu untuk mengakuinya sehingga memanipulasi dirinya untuk terlihat sempurna dimata orang lain," jelasnya.

Menutup pemaparannya, politis senior PKS ini mengungkapkan bahwa personal branding telah bekerja, saat orang lain mengapresiasi versi terbaik diri kita.

"Personal branding ini ada kaitannya dengan bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas kelebihan yang Allah berikan dan bijaksana menyikapi kekurangan yang ada, sehingga kita memiliki rasa untuk berkembang menjadi versi terbaik diri kita," pungkasnya.

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta I

> "Personal branding adalah bagaimana cara mengembangkan keunikan yang membuat diri kita lebih menarik dari orang lain. Personal Branding adalah seni untuk menjadi diri sendiri, serta seni untuk menepati dan membuktikan janji tentang diri sendiri kepada orang lain. Bukan sekedar promosi profilnya

Kunjungan ke Bengkulu, Presiden PKS Lakukan Sejumlah Agenda

KUTIPAN

Bengkulu (23/10) --- Kunjungan Presiden PKS Ahmad Syaikhu beserta Pengurus Pusat PKS yang tiba pada pukul 08.20 WIB (22/10/2021) di Bandara Fatmawati Soekarno Putri Bengkulu, disambut dengan segenap keluarga PKS Bengkulu, DPTW dan DPTD.

Momen tersebut dihadiri langsung oleh Anggota Dewan Provinsi Bengkulu, Sefty Yuslinah dan Herizal Apriansyah serta Dewan Provinsi Kota Bengkulu, Sri Astuti, dan Waka Dewan III Kota Bengkulu.

Sambutan tersebut penuh rasa kekeluargaan oleh Ketua DPW PKS, Sujono yang bersalaman dan berpelukan dengan Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

Setelah tiba di Bandara, rombongan langsung menuju rumah besan Presiden PKS, Almarhum Ahmad Zarkasi untuk bersilaturahmi yang dijamu hangat oleh keluarga Almarhum dan rekan PKS Bengkulu.

Silaturahmi tersebut diteruskan dengan ziarah bersama langsung ke makam Almarhum Ahmad Zarkasi di Lorong Jati, Kelurahan Panorama Kota Bengkulu.

Selama di Bengkulu, Presiden PKS, Ahmad Syaikhu akan mengadakan rangkaian agenda bersama PKS Bengkulu, diantaranya agenda bersama Bupati Rejang Lebong, Sosialisasi 4 pilar, dan temu Pemuda Milenial di Bengkulu.

H. AHMAD SYAIKHU
Presiden PKS

Selama di Bengkulu, Presiden PKS, Ahmad Syaikhu akan mengadakan rangkaian agenda bersama PKS Bengkulu, diantaranya agenda bersama Bupati Rejang Lebong, Sosialisasi 4 pilar, dan temu Pemuda Milenial di Bengkulu.

Kunjungi Kanal Resmi Fraksi PKS DPR RI

- Website fraksi.pks.id
- Instagram fraksipksdprri
- Twitter @fraksipksdprri
- Facebook Fraksi PKS DPR RI
- Youtube PKSTV DPR RI

Nantikan Setiap Pekan